

PENGAUDITAN *FRAUD* DALAM DUNIA BISNIS

Studi Pustaka

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer

NIM: 012114039

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2005

Skripsi

PENGAUDITAN *FRAUD* DALAM DUNIA BISNIS

(Studi Pustaka)

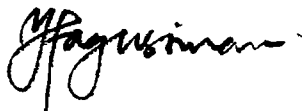
Oleh :

Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer

NIM : 012114039

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dra. YF. Gien Agustinawansari., MM., Akt

Tanggal: 29 Juni 2005

Pembimbing II



Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt

Tanggal: 20 Juli 2005

Skripsi


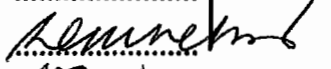

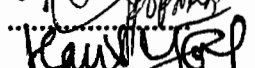
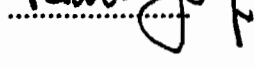
PENGAUDITAN *FRAUD* DALAM DUNIA BISNIS

(Studi Pustaka)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer
NIM: 012114039

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal: 30 Agustus 2005
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt	
Sekretaris	: Fr. Reni Retno Anggraeni, S.E., M.Si., Akt	
Anggota	: Dra. YF. Giem Agustinawansari, MM., Akt	
Anggota	: YP. Supardiyono, M.Si., Akt	
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 31 Agustus 2005

Fakultas: Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dekan

(Dra. Alex Kahu Lantum M.S.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

☞ *“Aku percaya bahwa di dalam kekuatan-Mu yang tak terbatas, Engkau dapat membuat segalanya menjadi baik, bahkan dari setiap luka yang menggores aku. Tambahkanilah iman, harapan dan cintaku, ajarilah aku untuk memandang cinta-Mu sebagai petunjuk bagiku dalam setiap kejadian di hidupku.”*

☞ *“Berusahalah lakukan yang terbaik, trus..... mengalir aja. ☺”*

Karya ini dipersembahkan untuk:

- ☞ *Tuhanku Yesus Kristus*
- ☞ *Papaku H A Frederikus Hamboer*
- ☞ *Mamaku, Robertien Sulasih*
- ☞ *Adek-adekku: Angelina Dwiratna Apriliani Hamboer
(Linda) dan Anita Wilfrida Triwahyuni Hamboer (Frida)*
- ☞ *Sahabat-sahabatku*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Agustus 2005.

Penulis



Antonia Mathilda Srimulyani H

ABSTRAK

PENGAUDITAN *FRAUD* DALAM DUNIA BISNIS

Studi Pustaka

Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2005

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor pendorong munculnya tindakan *fraud* dalam dunia bisnis. (2) Mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan. (3) Mengetahui berbagai kasus aktual yang dapat dijadikan contoh penjas berkaitan dengan pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis di Indonesia

Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik yang digunakan: (1) Membaca berbagai jurnal, artikel, buku bacaan dan literatur pendukung lainnya. (2) Mengambil intisari informasi-informasi penting yang berkaitan dengan data yang ingin dikumpulkan. (3) Menghubungkan informasi-informasi penting tersebut ke dalam pembahasan skripsi.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: (1) Berbagai macam bentuk tindakan *fraud* dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe tertentu; Indikator-indikator *fraud* dapat dibedakan berdasarkan bagian tertentu dalam laporan keuangan dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan ada tiga faktor yang mendorong terjadinya *fraud*: *Pressure*, *Rasionalization*, dan *Opportunity*. (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mendeteksi *fraud*: jenis pengauditan *fraud* yang akan dilakukan, pihak yang memanfaatkan hasil pengauditan *fraud*, keahlian auditor yang harus dimiliki untuk melakukan pengauditan *fraud*, teknik melakukan investigasi dan faktor penghambat pengauditan *fraud*. Hasil *fraud audit* harus meliputi semua penemuan, kesimpulan, tindakan korektif dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan. (3) Kasus aktual yang dijadikan contoh penjas yang berkaitan dengan pengauditan *fraud* di Indonesia yaitu kasus Bank Global dan Bank Mandiri.

ABSTRACT

FRAUD AUDITING IN BUSINESS

Literature Study

Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2005

This research aimed: (1) To know the types of fraud, fraud indicator and drivers of fraud in business. (2) To find out and to understand things that should be recognized by an auditor to detect fraud and report it to the company. (3) To find out several actual cases used as a explanatory examples related to the fraud auditing in Indonesia

To achieve this research goals, techniques applied were: (1) Reading many journals, articles, text books and other supporting literatures. (2) Summarizing the important information related to the data gathered. (3) Relating those significant information in the analysis.

The research concluded that: (1) Various kinds of fraud attitudes could be classified based on certain types; fraud indicators could be differentiated based on certain part on the financial report and factors that influenced it; and there were three factors that drove fraud: Pressure, Rasionalization, and Opportunity. (2) Things that should be recognized by auditor on detecting fraud were kinds of fraud auditing that wanted to do, part/people that took advantages of fraud auditing's results, auditor's skills that should be kept to do fraud auditing, investigation techniques and obstacles factors of fraud auditing. The result of fraud audit should cover all findings, conclusions, and corrective attitudes and recommendations for revision. (3) Factual cases, that were placed as explanatory example related to fraud auditing in Indonesia, were the case of Bank Global and Bank Mandiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus karena hanya dengan rahmat dan berkah-Nya yang selalu dilimpahkan dari perencanaan, penyusunan skripsi sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Pengauditan *Fraud* Dalam Dunia Bisnis”**, penulis banyak menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yesus, Tuhan dan sahabatku. Terima kasih karena Engkau sangat baik padaku dengan berbagai cara dan jalan yang Kau rancang untukku.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Dra. YF. Gien Agustinawansari., M.M., Akt selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dalam memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Bapak Eduardus Maryarsanto P., SE, Akt, atas segala bimbingan yang sangat berguna bagi penulis serta keakrabannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak YP. Supardiyono, M.Si., Akt atas segala masukan pada saat pendadaran, sehingga skripsi ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik.
7. Papaku Eddy H, atas segala pengalaman yang semakin membuat aku dewasa.

8. Mama dan sahabatku Robertien Sulasih. Aku bangga sama mama, empat ibu jariku pun tidak cukup untuk melambangkan betapa hebatnya mama, terima kasih atas segalanya.
9. Adek-adek, sahabat sekaligus teman berantemku. d'Linda cuplis, yang sudah membantu mengetik skripsi ini dan d'Frida Phe-lacx yang sangat berperan penting dalam memberi aku semangat untuk maju, terima kasih. Terimakasih juga terutama karena mau mendengarkan omelanku tiap hari, karena itulah penyusunan skripsi ini jadi lebih menyenangkan (kejam). *TRIDA is the best.*
10. Sr Virgula SSPS, Keluarga besar Carolus H, Opa Michele Wowor sekeluarga, dan semua keluarga di Temanggung, atas semua doa dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabatku: Asti (Akt'01), terima kasih atas kerelaannya menjadi kantong tawa dan airmataku; Moni lilik (Akt'01), walaupun kita tidak sering bertemu, tapi kamu selalu berhasil membuat aku tidak minder, terima kasih; Widhi (PBI'01); Yoland (Psi'01), terima kasih sudah membuat aku tidak *kupe*. Vivi tofu (Akt'01); P'D danang (Akt'01); Ririn miko (Akt'01); terima kasih karena adanya kalian, aku bukanlah satu-satunya orang gila di kampus.
12. Anak-anak P3W, yang dari *guyonannya*, tidak dapat dikatakan anak-anak lagi: Mbak R Enthung, Mami Yani Gemak, Mbak Windhu Kinjeng, Dek Alex Tapir, Si Beti Bethul, Mas Daniel Jangkrik, Mbah Iyut Betet, Mas Yan Pitik, Mbak Vero Prenjak, dan Asti Louhan (lagi), *speechless* aku, pokoknya kalian selalu berhasil bikin hidupku seperti di Gembiraloka *and I'll miss you all, guys*. Untuk X P3W: Mas Lereng, Mbak Honi, Tepen, *goodluck*.
13. Semua teman-teman seperjuangan: Yeti daat, Lulu, Jein, Woro, Fani, Vita, om-tante, eryka, vina, xkk1&kk2 dkk; "dosen-dosen" penguji pra pendadaran:

Ambyar, moni (*again*), Uci&eko; teman-teman panitia Pekafe 2003; teman-teman asisten praktikum dan asisten BRS-online; warga FE tanpa terkecuali, angkatan 98 sampai 04, khususnya angkatan 01 kelas A. *Thanks for all, guys.*

14. Ibu Lisia Apriani, S.E., M. Si., Akt, terima kasih telah memberi kesempatan pada penulis menjadi asisten serta diperbolehkan belajar banyak dari ibu.
15. Pak Marianus, Pak Diksa, Pak Joko, Bu Erna, Bu Lilis, Pak Hans, Mas Yuli, Mas Has, Mas Frans, Mbak Heni, cs, dan seluruh dosen dan karyawan FE, terima kasih sudah membantu aku mengembangkan diri di kampus FE ini.
16. Berbagai pihak yang membantu penulis memperoleh beasiswa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di USD, khususnya para staf PR III USD.
17. Teman-teman KKP: Monika Trisna, Mbak Anita, Maya, Arbi, dan Ronald, dan seluruh warga Dadapbong khususnya keluarga Pak Haryanto dan Pak Jumadi.
18. Teman-teman mudika St. Theodorus Mrican, *God bless you all.*
19. Seluruh keluarga besar UPT Perpustakaan Mrican USD: Mas Didik, Mbak Wiwik, Mas Drajat, Pak Pargi, Bu Hartini, Mas Widodo, Mas Bayu, dkk.
20. Semua pihak yang mendoakan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

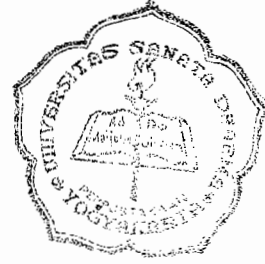
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak kekurangan dalam segala hal, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 31 Agustus 2005

Hormat saya

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	3
C. Batasan masalah	4
D. Tujuan penelitian.....	4
E. Manfaat penelitian	5
F. Sistematika penulisan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>fraud</i>	8
B. Pengertian pengauditan (<i>auditing</i>)	10
C. Definisi pengauditan <i>fraud (fraud auditing)</i>	13
D. Pengertian bisnis	13

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian	18
B. Waktu penelitian	18
C. Tempat penelitian	18
D. Obyek penelitian	18
E. Data yang dikumpulkan	19
F. Teknik pengumpulan data	20
G. Teknik analisis data	21

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tipe-tipe <i>fraud</i> , indikator <i>fraud</i> dan faktor-faktor pendorong munculnya <i>fraud</i> dalam dunia bisnis.	23
1. Tipe-tipe salah saji.	24
2. Tipe-tipe <i>fraud</i>	26
a. <i>Fraud</i> berdasarkan salah saji yang diakibatkannya	26
1) Kecurangan dalam pelaporan keuangan (<i>Fraudulent Financial Reporting</i>)	26

2) Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (<i>Misappropriation of Assets</i>).....	27
b. <i>Corporate Fraud</i> dan <i>Management Fraud</i>	30
1) Menurut Jack Bologna dan Robert J Lindquist	30
2) Menurut Amin Widjaja Tunggal	31
c. Tipe <i>fraud</i> berdasarkan pelaku dan korbannya	32
d. Tipe <i>fraud</i> berdasarkan dampaknya bagi perusahaan	38
e. Tipe-tipe <i>fraud</i> berdasarkan obyeknya.....	40
1) <i>Fraud</i> atas penerimaan kas.....	41
2) <i>Fraud</i> melalui pengeluaran kas.....	42
3) <i>Fraud</i> atas barang yang bukan kas.....	44
3. Praktek-praktek <i>fraud</i> yang umum... ..	44
4. Indikator-Indikator Munculnya <i>Fraud</i>	45
a. Indikator-Indikator Umum (<i>redflags</i>) terjadinya <i>Fraud</i>	46
b. Indikator-Indikator terjadinya <i>Fraud</i> , dilihat dari bagian tertentu laporan keuangan:	53
1) Indikator <i>fraud</i> pada piutang/penjualan.	53
2) Indikator <i>fraud</i> pada hutang/gaji.....	54
3) Indikator <i>fraud</i> pada buku besar/laporan.	56
c. Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	56
1) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor Integritas atau wewenang manajemen.....	56

2) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor tekanan yang tidak biasa dalam suatu perusahaan.....	57
3) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor tekanan pasar	58
4) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor kejadian dan/atau transaksi yang tidak biasa.....	58
5) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor arsip yang tidak memuaskan dan/atau masalah dalam perolehan bukti audit yang cukup	59
6) Indikator-indikator <i>fraud</i> berdasarkan faktor-faktor tambahan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan yang berbasis komputer.....	61
5. Karakteristik pelaku <i>fraud</i>	62
a. Karakteristik umum pelaku <i>fraud</i>	62
b. Karakteristik pelaku <i>fraud</i> berdasarkan jabatannya.....	63
1) Karakteristik manajemen puncak yang melakukan <i>fraud</i>	63
2) Karakteristik karyawan tingkat rendah yang melakukan <i>fraud</i>	65
6. Alasan dilakukannya <i>fraud</i>	66
B. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi adanya <i>fraud</i> dan melaporkan hasil penemuan <i>fraud</i> dalam suatu perusahaan.....	72

1. Tipe-tipe <i>fraud audit</i>	73
2. Peraturan-peraturan sebagai upaya pemberantasan <i>fraud</i>	73
3. Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil <i>fraud auditing</i> ,	75
4. Prinsip-prinsip dalam pengauditan <i>fraud</i>	77
5. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan <i>fraud audit</i>	80
6. Kemampuan yang harus dimiliki oleh <i>fraud auditor</i> yang ahli.....	87
7. Tindakan yang harus dilakukan dalam pengauditan <i>fraud</i>	94
8. Tahap-tahap investigasi <i>fraud</i>	97
9. Berbagai contoh pertanyaan dalam penginterogasian <i>fraud</i> ...	100
10. Hambatan dalam pengauditan <i>fraud</i>	108
11. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam pelaporan hasil penemuan <i>fraud (Fraud Audit Reports)</i>	110
C. Kasus-kasus aktual yang dapat dijadikan contoh penjas yang berkaitan dengan pengauditan <i>fraud</i> dalam dunia bisnis.	112
1. Bank Global	112
a. Kasus	112
b. Analisis kasus Bank Global	115

2. Bank Mandiri	117
a. Kasus	117
b. Analisis kasus Bank Mandiri	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	129
C. Keterbatasan Penelitian	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1: Jenis Kecurangan Tipe <i>Fraudulent Financial Reporting</i> dan Contoh Tindakannya.....	28
TABEL IV.2: <i>Fraud typology by corporate owners and managers</i> (Tipologi <i>fraud</i> yang dilakukan oleh pemilik dan manajer perusahaan).....	33
TABEL IV. 3: <i>Fraud Typology by Corporate, Vendors, Suppliers, and contractors</i> (Tipologi <i>Fraud</i> yang dilakukan oleh perusahaan, Pemasok, dan Kontraktor)	36
TABEL IV.4: <i>Fraud Typologi by Corporate Employees</i> (Tipologi <i>fraud</i> yang dilakukan oleh organisasi pekerja).....	37
TABEL IV.5: <i>Fraud Typologi by Corporate Customers</i> (Tipologi <i>fraud</i> yang dilakukan oleh organisasi konsumen)	38
TABEL IV.6: Tabel Rincian Kredit Bermasalah Bank Mandiri yang Terkait BPPN	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1: Faktor Pemicu <i>Fraud</i>	67
Gambar IV.2: Tanggung jawab Auditor Saat Kemungkinan Keberadaan <i>Irregularity</i> sudah Dideteksi	98
Gambar IV.3: Proses Pemeriksaan yang Dapat Diterapkan Atas Dugaan Adanya <i>Fraud</i> dalam Fungsi Penjualan.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin maraknya kasus-kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di berbagai belahan dunia, istilah "*fraud*" pun menjadi sering dibicarakan banyak pihak. Ibarat penyakit, KKN tidak hanya berjangkit di sektor pemerintah tetapi sudah mewabah ke semua sektor. Badan usaha swasta, lembaga pemerintahan, anggota masyarakat bahkan yayasan sosial pun tidak luput dari serangan wabah "penyakit" ganas (KKN) ini.

Risiko *fraud* merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh setiap organisasi, baik perusahaan, instansi pemerintah maupun lembaga sosial. Contoh kecilnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, para aparat pemerintahan sering melakukan berbagai tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan *fraud*. Sudah tidak diragukan lagi bahwa *fraud* dalam beberapa bentuk dengan berbagai modus operandinya telah menimbulkan kerugian yang mencapai tingkatan bencana yang luar biasa (*highly disastrous*) (Muhammad, 2003;12).

Fenomena *fraud* tidak hanya menjadi masalah suatu negara tertentu saja tetapi *fraud* sudah menjadi masalah internasional. Berbagai kerugian yang diakibatkan oleh adanya praktek *fraud* di berbagai bidang telah dirasakan oleh dunia internasional. Kasus Enron dengan KAP Andersen yang telah menarik perhatian berbagai kalangan di seluruh dunia merupakan salah satu bukti

kerugian yang disebabkan oleh *fraud*. Di negara adidaya seperti Amerika Serikat saja, kerugian yang diakibatkan oleh praktek *fraud* terjadi dalam volume dan nilai yang sangat besar. Laporan FBI menyebutkan bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh *fraud* diperkirakan telah mencapai angka 200 milyar dollar Amerika setiap tahunnya (Sudarwan, 2003:31).

Di Negara Indonesia sendiri, korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi kosakata paling sering dibicarakan berbagai kalangan di negeri ini baik kalangan elit politik, sosial budaya, akademisi, pebisnis dan konglomerat maupun kalangan masyarakat kecil. Berbagai kerugian akibat tindakan kecurangan di Indonesia diperkirakan telah menghisap dana sebesar sepertiga dari dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan transparansi internasional menggolongkan Indonesia pada tingkat keenam sebagai negeri terkorup di dunia (Auditor Internal, 2003: 20)

Kasus penyimpangan fasilitas L/C yang terjadi di salah satu bank terkemuka di Indonesia merupakan salah satu contoh kegagalan menangkap dengan cepat sinyal-sinyal yang bisa diidentifikasi sebagai potensi *fraud* (Sofyan, 2003:16). Kasus lainnya adalah kasus munculnya indikasi kebocoran dana yang terjadi dalam PT Telkom Tbk yang berdasarkan kebocoran hasil audit forensik PwC diketahui sebesar 600-700 milyar rupiah. Kasus ini menjadi bukti adanya praktek penyimpangan dana dalam PT Telkom Tbk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terlepas dari masih banyak bantahan yang muncul dari PT Telkom mengenai hal ini (Media Akuntan, 2001: 31-33).

Belum lagi mencuatnya kasus dugaan suap mantan Jaksa Agung Andi M Ghalib dan kasus skandal Bank Bali (Hardjapamengkas, 1999). Berbagai kasus yang mewarnai pemberitaan di dalam negeri tersebut menambah daftar panjang kerugian yang disebabkan oleh *fraud*.

Munculnya berbagai kasus-kasus penyimpangan yang terjadi tersebut membuat harapan masyarakat terhadap proses audit menjadi tinggi. Banyak pihak menjadi berharap banyak pada audit karena mereka memiliki pandangan bahwa dengan audit, segala kasus penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan segera terkuak lebar. Maka dari itu segala pihak yang berhubungan dengan audit khususnya para auditor maupun calon auditor perlu memahami segala sesuatu yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk menguak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan lain khususnya yang terjadi dalam dunia bisnis.

Berbagai penjelasan tersebutlah yang melatarbelakangi pemilihan topik usulan proyek penelitian ini. Topik penelitian yang dipilih penulis adalah tentang *fraud audit* untuk kemudian akan dibahas secara lebih mendalam dalam laporan hasil pelaksanaan proyek penelitian ini. Adapun judul yang dipilih adalah "**Pengauditan *Fraud* dalam Dunia Bisnis**".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor pendorong munculnya tindakan *fraud* dalam dunia bisnis?

2. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan?
3. Kasus-kasus aktual apa yang dapat dijadikan contoh penjas yang berkaitan dengan pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas sebatas pada pengauditan *fraud* yang terjadi dalam dunia bisnis pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa. Selain itu mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pembahasan atas permasalahan penelitian hanya bersifat teoritis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor pendorong munculnya tindakan *fraud* dalam dunia bisnis.
2. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan.
3. Untuk mengetahui berbagai kasus aktual yang dapat dijadikan contoh penjas yang berkaitan dengan pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun pihak-pihak serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi skripsi di perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di Universitas Sanata Dharma. Selain itu dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru khususnya mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang *fraud audit*.

3. Bagi Auditor/Calon Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan para auditor maupun calon-calon auditor. Sehingga dapat membantu dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.

4. Bagi Praktisi Bisnis

Diharapkan dengan penelitian ini, para praktisi bisnis dapat mengetahui segala sesuatu tentang *fraud audit* dan manfaatnya di dunia bisnis.

5. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa. Sehingga dapat membantu mereka untuk lebih mampu

memahami materi yang diajarkan selama perkuliahan dan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Manfaat penelitian ini khususnya akan lebih dirasakan bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang auditing.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I –Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II –Landasan Teori

Bab II ini berisi tentang berbagai teori yang mendasari penyusunan skripsi ini. Teori-teori tersebut antara lain teori tentang pengertian *fraud*, pengertian audit, pengertian *fraud auditing*, dan pengertian bisnis.

3. Bab III –Metodologi Penelitian

Bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, tempat penelitian, obyek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini.

4. Bab IV – Pembahasan

Dalam Bab IV ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

5. Bab V – Penutup

Pada bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fraud*

Istilah *fraud* dapat didefinisikan sebagai berikut (Syahrul, 2000:396):

Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk melakukan penipuan/kecurangan terhadap pihak lain, sehingga menyebabkan kerugian/membahayakan. Termasuk dalam penipuan/kecurangan adalah tindakan yang dengan disengaja memberikan informasi yang salah, menyembunyikan fakta, atau tidak mengatakan yang sebenarnya untuk menipu/memanipulasi sehingga merugikan seseorang/organisasi. Kecurangan adalah suatu konsep hukum dan penerapan istilah itu dalam suatu keadaan spesifik harus ditentukan oleh seorang ahli hukum.

Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 1991:17). Tunggal juga mengutip definisi kecurangan yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditor* di Amerika yang mendefinisikan bahwa *fraud* mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregularities*) dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja.

Alison mengatakan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Sedangkan *The Association of Certified Fraud Examiner* membuat definisi 'Kecurangan dan Penyalahgunaan Jabatan' sebagai berikut: Penggunaan

jabatan untuk memperkaya seseorang dengan menggunakan atau memanfaatkan dengan sengaja harta atau sumber daya organisasi. Istilah kecurangan (*fraud*) dapat digunakan untuk berbagai perbuatan dosa yang termasuk (Tunggal, 1995:251):

1. Kecurangan yang melibatkan perlakuan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal.
2. Pernyataan salah yang disengaja (*intentional misstatements*) dalam penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan suatu entitas.
3. Pencurian (*theft*), apakah disertai dengan pernyataan yang salah dari catatan akuntansi atau laporan keuangan atau tidak.

Menurut *The Professional Standards and Responsibilities Committee* dari *The Institute of Internal Auditors* dalam *Statement of Internal Auditor Standard No. 3 – Mei 1985*, kecurangan (*fraud*) dapat juga didefinisikan sebagai (Tunggal, 1995:252):

Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside the organization. (Kecurangan meliputi serangkaian ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Kecurangan dapat dilakukan untuk kepentingan atau atas kerugian organisasi dan oleh orang diluar atau didalam organisasi).

Fraud memiliki banyak arti (Bologna dan Lindquist, 1987:5). Pengertian *fraud* berbeda tergantung dari sudut pandang mana

mengartikannya, antara lain: *Fraud as a Crime: The Michigan Law States* yang berbunyi:

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.

Definisi tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi: *Fraud* adalah sebuah istilah umum dan melingkupi berbagai arti yang mampu dipikirkan oleh manusia, yang dipilih oleh seorang individu untuk memperoleh keuntungan lebih dari penggambaran yang keliru. Tidak ada peraturan tertentu dan yang selalu dapat ditentukan sebagai dalil umum dalam pendefinisian *fraud*, sebagaimana *fraud* meliputi unsur kejutan, trik, kelicikan dan jalan yang curang oleh yang melakukan tipuan lain. Batas pendefinisiannya hanyalah keterbatasan kebangsaan manusia.

B. Pengertian Pengauditan (*Auditing*).

Secara umum definisi pengauditan (*auditing*) dapat dikemukakan sebagai berikut (Jusuf, 2001:11 dan Mulyadi, 1998:7):

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian auditing juga dapat diartikan sebagai: suatu investigasi yang dilakukan pemeriksa (*auditor*) untuk mengungkapkan opini pemeriksa

independen (*auditor's report*) sebagai suatu bentuk kejujuran dan pelengkap suatu laporan keuangan (Syahrul, 2000:69).

Dalam auditing dikenal juga istilah *General Audit* dan *Special Audit*. *General Audit* adalah: *The examination of contracts, order, and other original documents for the purpose of substantiating individual's transaction before their statement* (Cooper, 1984:43). Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi: *General Audit* adalah pemeriksaan kontrak, pesanan, dan dokumen-dokumen asli lainnya dengan tujuan penting dalam transaksi individual sebelum pernyataan mereka. Sedangkan *Special Audit* didefinisikan sebagai *An Audit having a limited, specified scope* (Cooper, 1984:468). Dalam bahasa Indonesia berarti bahwa *Special Audit* adalah suatu audit yang memiliki batasan dan ruang lingkup yang spesifik.

Audit khusus (*Special Auditing*) didefinisikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk maksud-maksud khusus (Harahap, 1991:277). Audit khusus ini dapat menggunakan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) walaupun sebenarnya tidak diharuskan. Namun, umumnya penjelasan audit khusus ini hampir sama dengan audit umum (*general audit*) sehingga banyak aturan-aturan dalam SPAP dapat digunakan kendatipun dengan beberapa modifikasi tertentu. Dalam audit jenis ini, akuntan tidak harus tunduk pada standar umum, standar pemeriksaan laporan atau standar pelaporan. Akuntan dapat membuat metode tersendiri dan bentuk laporan tersendiri.

Pemeriksaan oleh akuntan eksternal dapat berupa pemeriksaan umum (*general examination*) atau pemeriksaan khusus (*special examination* atau

investigation). Pemeriksaan umum dimaksudkan untuk memungkinkan akuntan eksternal memberikan pendapatnya atas kelayakan penyajian ikhtisar keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya (Tuanakotta, 1997).

Sedangkan untuk menjelaskan tentang pemeriksaan khusus, Tuanakotta menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus dapat berbentuk pemeriksaan untuk menemukan kecurangan (*fraud*), pemeriksaan untuk tujuan pembelian suatu perusahaan atau untuk tujuan merger, pemeriksaan untuk menentukan apakah suatu anak perusahaan atau bagian perusahaan sebaiknya dihentikan usahanya, dan lain-lain. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Tuanakotta tentang *general* dan *special examination* tersebut, *fraud audit* merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan khusus (*special examination*). *Fraud audit* termasuk dalam pemeriksaan khusus (*special audit*) yang berbeda dengan pemeriksaan umum atau *general audit* (Tunggal, 1991:74). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada *Special Audit* (pemeriksaan khusus).

C. Definisi Pengauditan Fraud (*Fraud Auditing*)

Fraud auditing (Bologna dan Lindquist, 1987:27): *Fraud auditing is a creation of an environment that encourages the detecting and preventing of fraud in commercial transaction*. Pernyataan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti: *Fraud Auditing* merupakan sebuah ciptaan dari

lingkungan yang mendorong pendeteksian dan pencegahan *fraud* dalam transaksi komersial.

Fraud auditing memiliki tujuan yang sempit yaitu mengungkapkan keberadaan, ruang lingkup, dan kesalahan pencatatan yang disengaja dan/atau penyalahgunaan aktiva. Penugasan pemeriksaan audit ini termasuk bukan kegiatan yang normal, karena kecurangan merupakan kejadian yang tidak biasa. Pelaksanaan *fraud auditing* akan menjadi cenderung lebih detail karena harus mengungkapkan apa yang telah sengaja disembunyikan.

D. Pengertian Bisnis

Ada berbagai definisi bisnis yang dikemukakan oleh para ahli. Istilah bisnis didefinisikan dengan begitu singkatnya atau dapat dikatakan bahwa bisnis disamakan dengan kata perdagangan, dagang; usaha (komersial) (Poerwodarminto, 1976). Bisnis juga dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, manusia maupun organisasi (Sudarmo, 1992:6). Pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa *Business is an organization that provides goods or services in order to earn profits* (Griffin dan Ebert, 2000:7). Pendapat tersebut jika diterjemahkan berbunyi: bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Istilah bisnis juga mengandung pengertian bahwa: *business is a competitive, profit seeking organization that produces and sells goods or services* (Stoner dan Dolan, 1998:3) yang artinya bahwa bisnis adalah sebuah

organisasi yang kompetitif, pencari keuntungan yang memproduksi dan menjual barang dan jasa. Kata bisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan atau peniagaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian (Guritno, 1994:25). Semua definisi tersebut memiliki satu pengertian yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa istilah bisnis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan.

Bisnis sering dikelompokkan berdasarkan skalanya yang kemudian dibagi menjadi bisnis kecil, menengah dan bisnis besar (Suryana, 2001:83). Sampai saat ini batasan masing-masing skala bisnis ini masih berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahannya masing-masing. Steinhoff dan Burgess berpendapat bahwa "*Small business has been defined in different ways by different organization and agencies*" (Suryana, 2001:83) yang diartikan bahwa usaha kecil telah didefinisikan secara berbeda tergantung pada kepentingan organisasi.

Klasifikasi bisnis (Suryana, 2001:84) dipandang dari sudut pandang banyaknya jumlah karyawan yang diserap dalam bisnis tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Stanley dan Morse. Stanley dan Morse yang mengidentikan bisnis dengan industri tersebut, berpendapat bahwa industri yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 9 orang, dikelompokkan sebagai industri rumah tangga (*Home Industry*). Industri yang digolongkan sebagai industri kecil adalah industri yang menyerap 10 sampai 49 orang karyawan. Industri sedang merupakan industri yang menyerap 50 sampai 99 orang karyawan.

Sedangkan industri besar merupakan industri yang menyerap lebih dari 100 orang karyawan.

Ada pula pendapat yang mengidentikkan bisnis dengan badan usaha (Purwominto, 2002:55). Dalam buku tersebut termuat penggolongan badan usaha menurut banyaknya pekerja, antara lain:

1. Badan usaha/perusahaan kecil, bila jumlah pekerjanya kurang dari 6 orang.
2. Badan usaha/perusahaan sedang, bila jumlah pekerjanya lebih dari 5 orang dan kurang dari 51 orang.
3. Badan usaha/perusahaan besar, bila jumlah pekerjanya lebih dari 50 orang.

Jika membahas tentang bisnis, perlu juga melihat bisnis dari jenis lapangan usaha yang dijalankannya. Penggolongan usaha menurut lapangan usaha yang dijalankannya (Purwominto, 2002:54) yaitu antara lain dikelompokkan menjadi:

1. Usaha ekstraktif.

Usaha ekstraktif merupakan usaha yang kegiatannya mengambil atau mengumpulkan hasil kekayaan alam yang telah tersedia dengan tidak mengubah sifatnya. Contoh usaha ekstraktif ini antara lain: pertambangan minyak bumi, emas, penangkapan ikan di laut dan mengambil hasil hutan.

2. Usaha agraris

Usaha agraris merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan tanah dengan bantuan kesuburannya dengan cara penyebaran bibit, pengaturan

pengairan, pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penyemprotan hama dan sebagainya, sehingga memperoleh hasil.

3. Usaha industri (manufaktur)

Usaha industri (manufaktur) merupakan usaha yang kegiatannya mengolah atau mengubah bahan baku/mentah dengan campuran tertentu (bahan penolong) sehingga menjadi barang jadi yang siap dipakai atau masih setengah jadi. Contoh usaha industri ini adalah: kegiatan di pabrik semen, obat-obatan dan berbagai jenis makanan dan minuman.

4. Usaha niaga/perdagangan

Usaha niaga/perdagangan merupakan usaha yang kegiatannya membeli barang-barang dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Contoh usaha perdagangan ini antara lain: kegiatan yang dilakukan pada warung, supermarket, swalayan, grosir dan kegiatan ekspor-impor.

5. Usaha jasa

Usaha jasa yaitu badan usaha yang kegiatannya memberikan jasa kepada masyarakat dengan cara menyewakan barang, mengantarkan penumpang/barang, membantu penyelesaian pekerjaan tertentu, dan lain-lain dengan mengharapkan balas jasa (uang). Contoh jenis usaha ini antara lain: usaha transportasi, tukang cukur/salon, biro jasa pariwisata, periklanan, bank, asuransi, serta pos dan telekomunikasi.

Setelah melihat penggolongan kegiatan bisnis tersebut, dengan pertimbangan waktu dan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, tidak

memungkinkan untuk membahas secara mendalam semua jenis kegiatan bisnis tersebut. Penekanan dalam pelaksanaan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah kegiatan bisnis yang termasuk dalam golongan usaha jasa dan usaha dagang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka karena dilakukan dengan menggunakan perbandingan dan penjelasan berdasarkan berbagai buku, literatur dan jurnal sumber yang telah ada sebelumnya. Sehingga penelitian maupun pembahasan dalam skripsi ini lebih bersifat teoritis.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2005.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat. Tempat-tempat tersebut termasuk di perpustakaan-perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan juga pada berbagai tempat yang memungkinkan untuk mengakses internet.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemeriksaan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam dunia bisnis khususnya pada bisnis jasa dan perdagangan.

E. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan adalah data dan informasi yang berkaitan dengan definisi, faktor-faktor pendorong munculnya *fraud*, proses pendeteksian *fraud* dan segala hal yang berkaitan dengan pelaporan hasil *fraud* dan juga contoh-contoh kasus yang dapat membantu pengambilan kesimpulan, antara lain:

1. Masalah I: Tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor pendorong munculnya tindakan *fraud* dalam dunia bisnis.

Data yang diperlukan:

- a. Tipe-tipe *fraud* yang mungkin terjadi
- b. Praktek-praktek *fraud* yang umum
- c. Indikator-indikator munculnya *fraud*
- d. Karakteristik pelaku *fraud*
- e. Modus Operandi tindakan *fraud*
- f. Alasan dilakukannya *fraud*
- g. Pengklasifikasian *fraud*

2. Masalah II: Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan.

Data yang dikumpulkan tentang:

- a. Undang-undang tentang upaya pemberantasan *fraud*
- b. Pihak-pihak yang membutuhkan *fraud audit*
- c. Prinsip-prinsip dalam pengauditan *fraud*

- d. Tindakan yang harus dilakukan dalam pengauditan *fraud*
 - e. Kemampuan yang harus dimiliki oleh *fraud auditor* yang ahli
 - f. Tahap-tahap investigasi *fraud*
 - g. Berbagai contoh pertanyaan dalam penginterogasian *fraud*
 - h. Hambatan dalam penginterogasian *fraud*
 - i. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan auditor dalam pelaporan hasil penemuan *fraud*
3. **Masalah III:** Kasus-kasus aktual yang dapat dijadikan contoh penjas yang berkaitan dengan pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis di Indonesia.
- Data yang dikumpulkan tentang:
- a. Berbagai contoh kasus penjas tentang pengauditan *fraud* di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Mei 2005.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, antara lain dengan cara:

1. Membaca jurnal-jurnal, artikel, buku-buku bacaan dan literatur-literatur pendukung lainnya.
2. Mengambil intisari informasi-informasi penting yang berkaitan dengan data-data yang ingin dikumpulkan.

3. Mengaitkan atau menghubungkan informasi-informasi penting tersebut ke dalam pembahasan skripsi agar menjadi satu kesatuan pikiran secara keseluruhan, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam perumusan masalah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, antara lain dengan cara:

1. **Masalah I:** Tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor yang mendorong munculnya tindakan *fraud* dalam dunia bisnis.

Dalam melakukan analisis data untuk memecahkan masalah I ini, tindakan yang dilakukan adalah dengan memaparkan dan menjelaskan mengenai tipe-tipe *fraud*, indikator *fraud* dan faktor-faktor pendorong munculnya *fraud* dengan menggunakan hasil pencarian data. Data yang sudah dikumpulkan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menambah pemahaman untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama secara sistematis.

2. **Masalah II:** Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan.

Agar dapat memecahkan masalah II ini, tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan hasil pencarian data di berbagai sumber baik jurnal, buku, internet maupun literatur-literatur lain untuk kemudian

dilakukan pengkritisan yang lebih mendalam mengenai segala hal apa yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan.

3. **Masalah III:** Kasus-kasus aktual yang dapat dijadikan contoh penjas tentang pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis di Indonesia.

Untuk masalah III, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memaparkan dan menjelaskan pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis dengan menggunakan contoh-contoh kasus untuk kemudian akan ditarik kesimpulan. Adapun contoh-contoh kasus tersebut dikumpulkan dari media masa, seperti surat kabar, internet, koran, dan sumber-sumber lain yang memuat informasi-informasi yang aktual yang terjadi dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Mei 2005.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tipe-tipe *Fraud*, Indikator *Fraud* dan Faktor-faktor Pendorong Munculnya *Fraud* Dalam Dunia Bisnis.

Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, auditor dalam hal menjalankan tugasnya, berkaitan khusus dengan tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi (khususnya auditing), hanya dikenal 2 istilah untuk kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yaitu: kekeliruan (*errors*), dan ketidakberesan (*irregularities*) (SA Seksi 316, paragraf 03). Faktor yang membedakan antara kekeliruan dan ketidakberesan itu adalah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kekeliruan dilakukan secara tidak sengaja sedangkan ketidakberesan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja. Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dokumentasi, pencatatan ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengiktisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kedua tipe kesalahan tersebut harus diwaspadai dan auditor harus mencari prosedur yang dapat menemukan kedua tipe kesalahan ini. Kesalahan ini dapat ditemukan dengan mengamati kelemahan sistem pengawasan intern, menilai tingkat kejujuran manajemen, melihat transaksi yang tidak biasa, dan lain-lain.

Kekeliruan (*error*) menunjukkan kesalahan yang tidak disengaja dalam laporan keuangan. Kesalahan (*error*) tersebut meliputi kesalahan perhitungan atau kesalahan tulis dalam catatan dan data akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi serta keterlewatan dan kesalahan menafsirkan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun (Tunggal, 1995: 250).

Penyelewengan (*irregularity*) menunjukkan penyimpangan yang disengaja yang mengakibatkan distorsi dalam laporan keuangan seperti halnya tindakan kecurangan oleh manajemen dan penyalahgunaan harta perusahaan. Penyelewengan dalam laporan keuangan mungkin terjadi karena manajemen dengan sengaja tidak menyajikan atau tidak menyatakan akibat dari kejadian atau transaksi secara benar, memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen; menghilangkan informasi yang penting dari catatan atau dokumen, mencatat transaksi yang palsu; sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah; dan menggunakan harta untuk kepentingan diri pribadi, manajemen, pegawai atau pihak ketiga. Tindakan *fraud*, dapat dikelompokkan dalam tindakan ketidakberesan (*irregularities*).

1. Tipe-tipe Salah Saji.

Sebelum membahas tentang tipe-tipe *fraud* secara lebih mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tipe-tipe salah saji yang perlu dipertimbangkan auditor dalam mengaudit. Ada dua tipe salah saji yang sangat relevan dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor tentang

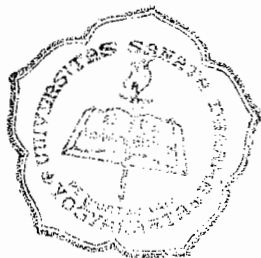
kecurangan atas laporan keuangan yang diauditnya. Tipe-tipe salah saji tersebut, menurut SA seksi 316 paragraf 03-05 adalah:

a. Salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan tersebut.

b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva.

Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva ini, berkaitan dengan pencurian aktiva organisasi yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, salah saji ini tidak semata-mata bisa terjadi karena adanya kecurangan dalam organisasi saja, melainkan dapat juga terjadi karena hal lain antara lain dokumen benar-benar hilang, ketidakseimbangan buku besar karena adanya kekeliruan akuntansi yang tidak disengaja, dan hubungan analitik yang diakibatkan dari perubahan faktor-faktor ekonomi yang tidak diketahui.



2. Tipe-tipe *Fraud*.

Dalam suatu organisasi usaha, kecurangan dapat dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan, yang disebut kecurangan korporasi (*Corporate Fraud*). Kecurangan dapat melibatkan penggunaan suatu sistem akuntansi untuk menggambarkan suatu citra yang palsu suatu perusahaan. Kecurangan dapat pula terjadi karena kegagalan auditor untuk mendeteksi kesalahan (*Errors*) atau kesalahan penyajian (*Misstatements*) yang disebut kegagalan audit (*Audit Failure*).

a. *Fraud* Berdasarkan Salah Saji yang Diakibatkannya.

Berdasarkan salah saji yang dapat diakibatkan oleh *fraud* dan yang harus dipertimbangkan auditor dalam melakukan tugasnya, *fraud* dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:

1) Kecurangan dalam pelaporan keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

Kecurangan dalam pelaporan keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*) dapat menyangkut tindakan-tindakan seperti yang disajikan berikut ini (SA seksi 316, paragraf 04):

- a) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan cacatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
- b) Representasi yang salah atau tidak menyajikan suatu kejadian dalam laporan keuangan atau sengaja menghilangkan kejadian, transaksi dan informasi penting dari laporan keuangan.

- c) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Berbagai contoh tentang kecurangan pelaporan laporan keuangan ini (Tunggal, 1991:36-37) dapat dilihat di Tabel IV. 1.

2) Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (*Misappropriation of Assets*)

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (*Misappropriation of Assets*) ini seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan. *Fraud* tipe ini berkaitan dengan pencurian aktiva organisasi yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang atau jasa yang tidak diterimanya. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

TABEL IV.1
Jenis Kecurangan Tipe *Fraudulent Financial Reporting* dan Contoh Tindakannya.

Jenis Kecurangan	Contoh
1) Memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah tanggal faktur pemasok sehingga biaya tidak dicatat sampai periode akuntansi berikutnya. - Mengubah tanggal dokumen pengiriman agar dapat membukukan penjualan (dan mengakui laba) sebelum waktu pengiriman aktual. - Mengubah jumlah faktur untuk memperkecil jumlah biaya yang dibukukan dalam catatan akuntansi. - Menciptakan gambaran perhitungan barang yang palsu.
2) Menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen.	<ul style="list-style-type: none"> - Gagal untuk mencatat faktur pemasok pada akhir tahun.
3) Mencatat transaksi tanpa substansi.	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan pesanan pelanggan yang palsu.

Sumber: Tunggal, Amin Widjaja. (1991). *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman: 36-36.

TABEL IV.1 (Lanjutan....)
Berbagai Jenis Kecurangan Tipe *Fraudulent Financial Reporting*
Dan Contoh Tindakannya.

Jenis Kecurangan	Contoh
<p>4) Salah menerapkan kebijakan akuntansi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkapitalisir/mengaktivir biaya dan item lain yang seharusnya digolongkan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima. - Mengakui pendapatan dan laba terhadap penjualan yang mengandung resiko pengembalian yang signifikan - Secara sengaja membukukan penyisihan yang tidak memadai untuk menunjukkan suatu jumlah pendapatan yang ditentukan dimuka. - Mencatat pembayaran dimuka sebagai biaya periode berjalan.
<p>5) Gagal mengungkapkan informasi yang signifikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyembunyikan suatu keburukan nilai aktiva tertentu. - Menyembunyikan litigasi (proses pengadilan) yang “<i>pending</i>”. - Tidak melaporkan suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi.

b. Corporate Fraud dan Management Fraud

Pada dasarnya *fraud* dalam dunia bisnis digolongkan dalam 2 tipe yaitu: *Corporate Fraud* dan *Management Fraud*.

1) Menurut Jack Bologna dan Robert J Lindquist (1997:6)

Pengertian *Corporate Fraud* dan *Management Fraud*, dikemukakan oleh Jack Bologna dan Robert J Lindquist (1997:6) yaitu:

a) *Corporate Fraud: Corporate fraud is any fraud perpetrated by, for, or against a business corporation.*

Pengertian tersebut jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

Corporate Fraud merupakan *fraud* yang dilakukan oleh, untuk atau bersaing dengan suatu perusahaan bisnis.

b) *Management Fraud: Management fraud is the intentional misrepresentation of corporate or unit performance levels perpetrated by employees serving in management roles who seek to benefit from such frauds in terms of promotions, bonuses or other economic incentives, and status symbols.*

Pengertian tersebut jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

Management Fraud merupakan kekeliruan penggambaran perusahaan atau level unit pelaksanaannya yang dilakukan secara sengaja oleh karyawan yang mencari keuntungan dari

fraud tersebut untuk tujuan promosi, bonus atau penghargaan ekonomi yang lain, serta status.

2) Menurut Amin Widjaja Tunggal

Penjelasan tentang *Corporate Fraud* dan *Management Fraud* ini (Tunggal (1991: 35, 37-38) dijelaskan sebagai berikut:

a) *Corporate Fraud* (Kecurangan Korporasi)

Kecurangan korporasi atau kejahatan ekonomi (*economic crime*) biasanya dilakukan oleh pejabat; eksekutif dan atau manajer pusat laba (*profit centre managers*) dan perusahaan publik untuk memuaskan kebutuhan ekonomis jangka pendek mereka. Dalam kenyataannya, ini dapat merupakan gaya manajemen yang berorientasi jangka pendek yang menciptakan kebutuhan terhadap kecurangan korporasi, memberikan tekanan untuk meningkatkan kemampuan sekarang untuk menghadapi kesempatan baru dan kebutuhan untuk mengambil resiko yang tidak bijaksana atas sumber daya perusahaan. Kecurangan ini bukan hanya karena tekanan kemampuan jangka pendek, tetapi juga karena kerakusan ekonomi (*economic greed*) dan keserakahan/ketamakan (*avarice*) yang menodai nilai sosial dan yang mengakibatkan kecurangan korporasi.

b) *Management Fraud/White Collar Crime* (Kecurangan Manajemen)

Kriminal berkerah putih dimotivisir oleh norma-norma sosial, diterima dan dilakukan oleh kelompok yang secara tidak langsung memberi dukungan terhadap aktivitas tidak legal. Berbeda dengan kejahatan tradisional, kejahatan ini bertujuan untuk mencuri uang dalam jumlah besar, modus operandi yang digunakan pun dengan menggunakan teknologi dan komunikasi massa. Sebagai tambahan, kejahatan ini menimbulkan kerugian ekonomis, kerugian fisik dan merusak struktur sosial.

Dengan mengetahui 2 (dua) tipe dasar *fraud* tersebut, dapat membantu *auditor* dalam melakukan tugasnya. Jika *auditor* mampu melihat dan membedakan *fraud* sesuai dengan tipenya (*Corporate Fraud* atau *Management Fraud*), *Auditor* dapat membuat perencanaan yang lebih tepat, relevan dan berguna untuk digunakan sebagai kerangka dasar untuk melakukan *fraud auditing*.

c. **Tipe *Fraud* Berdasarkan Pelaku dan Korbannya**

Cara lain untuk memperlihatkan betapa luas dan rumitnya *fraud*, mungkin dapat di desain suatu tipologi *fraud*, seperti yang ditunjukkan dalam tabel IV.2, IV.3, IV.4 dan tabel IV.5. Melalui tabel-tabel tersebut, berbagai karakteristik *fraud* dan korban dari setiap tipe *fraud* dapat lebih diketahui/dipahami, juga siapa pihak yang melakukan tindakan *fraud* tersebut.

TABEL IV.2

Fraud typology by corporate owners and managers
 (Tipologi *fraud* yang dilakukan oleh pemilik dan manajer perusahaan)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Customers</i> (Konsumen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>False Advertising</i> (Pengiklanan yang salah) ▪ <i>False Weights and Measures</i> (Takaran yang salah) ▪ <i>False Representation</i> (Penggambaran yang salah) ▪ <i>False Labeling/Branding</i> (Pemberian label/merk yang salah) ▪ <i>Price Fixing</i> (Penentuan harga yang tidak benar) ▪ <i>Quality Substitution</i> (Penggantian kualitas) ▪ <i>Cheap imitations</i> (Tiruan murahan) ▪ <i>Defective product</i> (Produk rusak)
<i>Competitors</i> (Pesaing)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Theft of trade secrets</i> (Pencurian rahasia perdagangan)
<i>Bankers</i> (bankir)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Check kiting</i> (Mengubah angka pada cek untuk menambah nilai parinya dengan maksud menipu) • <i>False applications for credit</i> (Penyalahgunaan kredit)

Sumber: Bologna, Jack & Robert J Lindquist. (1987). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc. Halaman: 15-16.

TABEL IV.2 (Lanjutan...)
Fraud typology by corporate owners and managers
(Tipologi *fraud* yang dilakukan oleh pemilik dan manajer perusahaan)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Bankers</i> (bankir)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>False financial statements</i> (Kesalahan Pelaporan keuangan)
<i>Company/ Employer</i> (Perusahaan/ Pemberi kerja)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Expense Account Fraud</i> (<i>Fraud</i> dalam akun biaya) ▪ <i>Performance Fakery</i> ▪ <i>Overstating Revenue</i> (Pengakuan pendapatan diatas yang sebenarnya) ▪ <i>Overstating Assets</i> (Pengakuan aktiva diatas yang sebenarnya) ▪ <i>Overstating Profits</i> (Pengakuan laba diatas yang sebenarnya). ▪ <i>Understating Expenses</i> (Pengakuan biaya lebih rendah dari yang sebenarnya)

TABEL IV.2 (Lanjutan ...)

Fraud typology by corporate owners and managers(Tipologi *fraud* yang dilakukan oleh pemilik dan manajer perusahaan)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Company/ Employer</i> (Perusahaan/ Pemberi kerja)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Thief of assets</i> (Pencurian aktiva) ▪ <i>Embezzlement</i> (Penggelapan) ▪ <i>Conversion of Assets</i> (Penukaran aktiva) ▪ <i>Related Party Transactions</i> (Keberpihakkan dengan pihak yang melakukan transaksi) ▪ <i>Alteration/Destruction of records</i> (Perubahan/Pembinasaan arsip)
<i>Insurance Carriers</i> (Petugas Asuransi)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fraudulent Loss Claims</i> (Kecurangan dalam pengklaiman kerugian) • <i>Arson for Profit</i> • <i>False Applications for Insurance</i> (Penerapan asuransi palsu)
<i>Government Agencies (Agen Pemerintah)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>False Reports</i> (Pelaporan palsu) ○ <i>False Claims</i> (Pengklaiman palsu) ○ <i>Contract Padding</i> (pelapisan kontrak) ○ <i>Willful Failure to File Reports</i> (Kesengajaan membuat laporan salah)

TABEL IV. 3
Fraud Typology by Corporate, Vendors, Suppliers, and Contractors
(Tipologi *Fraud* yang dilakukan oleh perusahaan, Pemasok, dan Kontraktor)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Customers</i> (Konsumen)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Short Shipment</i> (Kerugian Pengiriman) • <i>Over billing</i> (Tagihan diatas yang sebenarnya) • <i>Double Billing</i> (Tagihan berganda) • <i>Substitution of Inferior Goods</i> (Penggantian barang-barang mewah) • <i>Corruption of Employees</i> (Korupsi yang dilakukan oleh karyawan)

Sumber: Bologna, Jack & Robert J Lindquist. (1987). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc. Halaman: 16.

TABEL IV.4
Fraud Typologi by Corporate Employees

(Tipologi *fraud* yang dilakukan oleh organisasi pekerja)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Employers</i> (Pemberi Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>False Employment Application</i> (Kesalahan dalam penerapan pekerjaan) ○ <i>False Benefit Claims</i> (Kesalahan dalam pengakuan keuntungan) ○ <i>False Expense Claims</i> (Kesalahan dalam pengakuan biaya) ○ <i>Theft and Pilferage</i> (Pencurian dan penyerobotan) ○ <i>Performance Fakery</i> (Pemalsuan prestasi) ○ <i>Embezzlement</i> (Penggelapan) ○ <i>Corruption</i> (Korupsi)

Sumber: Bologna, Jack & Robert J Lindquist. (1987). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc. Halaman: 17.

TABEL IV.5
Fraud Typologi by Corporate Customers
(Tipologi *fraud* yang dilakukan oleh organisasi konsumen)

<i>Victim</i> (Korban)	<i>Fraud type</i> (Tipe <i>fraud</i>)
<i>Vendors</i> (Pengecer)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tag Switching</i> (Penggantian kartu harga) ▪ <i>Shoptlifting</i> (Mencuri di toko) ▪ <i>Fraudulent Check</i> (Kecurangan dalam penggunaan cek) ▪ <i>Fraudulent Claims for Refunds</i> (Kecurangan dalam pengklaiman pendanaan kembali) ▪ <i>Fraudulent Credit Cards</i> (Kecurangan dalam penggunaan kartu kredit) ▪ <i>Fraudulent Credit Applications</i> (Penyalahgunaan kredit)

Sumber: Bologna, Jack & Robert J Lindquist. (1987). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc. Halaman: 17.

d. Tipe *fraud* Berdasarkan Dampaknya bagi Perusahaan

Berdasarkan pelakunya, kecurangan (*fraud*) dapat diklasifikasikan dalam dua kategori besar (Tunggal, 1991:30), yaitu:

1) Kecurangan yang merugikan perusahaan

Dalam kategori ini, perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Bentuk kecurangan dalam kategori ini misalnya *lapping*, *check kitting* maupun pencurian harta kekayaan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan atas kerugian organisasi umumnya

adalah untuk manfaat langsung atau tidak langsung dari seorang karyawan, individual luar, atau perusahaan lain. Beberapa contoh kecurangan yang merugikan perusahaan adalah:

- a) Penerimaan penyogokkan (*bribes*) atau pembayaran kembali (*kickback*)
- b) Pengalihan kepada seorang karyawan atau pihak luar, suatu transaksi yang secara potensial menguntungkan, yang secara normal menghasilkan keuntungan bagi organisasi.
- c) Penggelapan (*embezzlement*), yang ditandai oleh penyalahgunaan uang atau harta, dan pemalsuan catatan keuangan untuk menutup tindakan, dengan demikian membuat deteksi sulit dilakukan.
- d) Penyembunyian (*concealment*) yang disengaja atau penyajian yang salah dari kejadian atau data.

2) Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Untuk kecurangan kategori kedua ini, biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Kecurangan yang didesain untuk memberikan manfaat bagi organisasi ini umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur, yang mungkin dapat menipu pihak luar organisasi. Pihak luar yang dikelabui dengan kecurangan ini biasanya para pemegang saham, kreditur, konsumen maupun fiskus. Pelaku dari kecurangan demikian

biasanya mendapat manfaat secara tidak langsung. Beberapa contoh praktek *fraud* jenis ini (Tunggal, 1995: 152) antara lain:

- a) Penjualan atau penjaminan aktiva yang fiktif atau salah disajikan
- b) Penyajian atau penyajian transaksi-transaksi, aktiva, hutang atau pendapatan yang tidak tepat dan dilakukan secara sengaja
- c) Transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*) tidak tepat yang dilakukan secara sengaja, yaitu suatu pihak menerima manfaat yang tidak dapat diperoleh kalau tidak ada hubungan istimewa tersebut (*an arm's length transaction*).
- d) Kegagalan yang disengaja untuk mencatat atau mengungkapkan informasi yang signifikan untuk memperbaiki gambaran keuangan organisasi kepada pihak luar.
- e) Aktivitas usaha yang dilarang, seperti aktivitas yang melanggar undang-undang, peraturan, atau kontrak.
- f) Penyeludupan pajak (*tax fraud*).

e. Tipe-Tipe *fraud* Berdasarkan Obyeknya.

Berdasarkan obyeknya, *fraud* dapat digolongkan menjadi tiga (3) tipe (Harahap, 1991: 251-252) yaitu:

1) *Fraud* atas penerimaan kas.

Bentuk-bentuk *fraud* atas penerimaan kas biasanya adalah:

- a) Penyelewengan atas uang penerimaan dari penjualan tunai dengan cara tidak mencatatnya di *cash register* atau di faktur penjualan.
- b) Mengurangi uang kas dari penjualan tunai atau dari penagihan piutang. Buku kas debit direndahkan demikian juga perkiraan penjualan atau piutang sebelum kredit.
- c) Mengurangi jumlah potongan penjualan yang diberikan kepada langganan. Perbedaan antara potongan penjualan yang sebenarnya dengan potongan penjualan yang diberikan dimasukkan ke kantong sendiri.
- d) Mendebet perkiraan lain di luar perkiraan kas sewaktu menerima piutang dari langganan. Biasanya perkiraan yang di debit adalah Biaya, Piutang fiktif dan lain-lain.
- e) Menghapus piutang yang sehat dan mengantongi apabila diterima pembayarannya.
- f) Mencatat perkiraan piutang fiktif atas penjualan tunai. Penerimaan kas nantinya dikantongi.
- g) Mencatat piutang lebih rendah sewaktu melakukan penjualan dan mengantongi perbedaannya sewaktu penagihan.
- h) Lapping. Tidak mencatat penerimaan dari seorang langganan sebelum diterima pembayaran dari debitor lainnya. Setelah

diterima pembayaran dari debitor berikutnya baru penerimaan pertama tadi dicatat sebagai uang masuk pembayaran piutang. Dari metode ini sebenarnya yang diselewengkan adalah masa penyimpanan uang yang mungkin digunakan untuk kegiatan deposito dan bunganya diambil sendiri.

- i) Menguangkan pembayaran-pembayaran kepada pihak lain yang tidak berhak menerimanya. Misalnya, cek yang dikembalikan, wesel yang dikembalikan, dan lain-lain.

2) *Fraud* melalui pengeluaran kas.

Bentuk-bentuk penyelewengan melalui pengeluaran kas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengambil uang dari tempat penyimpanan kas, laci atau kas kecil dan memasukkan bon-bon yang tidak sah atau yang sudah pernah dikeluarkan.
- b) Memalsukan cek dan menguangkannya untuk kepentingannya sendiri.
- c) Menaikkan angka yang dibuat di lembar cek, dan perbedaannya dikantongi.
- d) Mengubah tanggal bon atau voucher dan menagihnya kembali untuk kedua kalinya.
- e) Membuat bon palsu untuk pembayaran biaya fiktif atau pembelian fiktif.

- f) Kiting. Sistem ini dilakukan apabila ada rekening di dua bank. Kasir yang mencuri uang kas berusaha menutupi kecurangannya dengan cara menarik uang dari Bank A tanpa melakukan pencatatan sehingga jumlah saldo tetap dapat menutupi yang diambil, dengan cara menyetorkannya ke rekening di Bank B.
- g) Menghilangkan nilai rupiah yang diberikan potongan sehingga nilai pembelian menjadi lebih besar, dan mengantongi potongannya.
- h) Potongan pembelian mungkin direndahkan atau tidak diambil dan pembayaran diminta sebesar harga pembelian diluar potongannya.
- i) Memperbesar jumlah kas kredit.
- j) Memanipulasi pembayaran gaji dengan berbagai cara:
 - (1) Menaikkan gaji karyawan
 - (2) Memperbesar daftar gaji.
 - (3) Menambah pegawai fiktif .
 - (4) Mencatat pegawai yang sudah dipecat/berhenti dalam daftar gaji.
 - (5) Mengantongi gaji yang tidak diambil.
 - (6) Tidak mencatat pengurangan gaji pegawai, tetapi kepada pegawai dibayar setelah dikurangi

c. *Fraud* atas barang yang bukan kas.

Bentuk-bentuk penyelewengan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengambil persediaan barang untuk kepentingan sendiri.
- b) Menjual barang tanpa melalui pencatatan. Dan pembayaran diselesaikan diluar.
- c) Mengoper barang dagangan baik melalui seseorang atau membeli secara sekongkol dan di luar dijual ke tempat lain.
- d) Mengambil bahan-bahan keperluan sehari-hari di kantor/pabrik untuk kepentingan sendiri seperti bahan bakar, oli, baterai, bola lampu, dan lain-lain.
- e) Pemanfaatan aktiva perusahaan bukan untuk urusan yang diizinkan oleh perusahaan.

3. *Praktek-Praktek Fraud* yang umum.

Auditor perlu memahami berbagai bentuk penyelewengan yang umum ditemukan. Berbagai bentuk penyelewengan yang umum ditemukan tersebut (Harahap, 1991: 253) secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran, adapun beberapa contohnya sebagai berikut:

- a. Mencuri perangkat.
- b. Mencuri barang dagangan, alat-alat, supplies, suku cadang dari peralatan besar.
- c. Mengambil uang kas dari brand kas atau *check register*.
- d. Tidak mencatat penjualan tapi langsung mengantongi hasilnya.

- e. Memperbesar biaya atau mendahulukan pembayaran untuk kepentingan sendiri.
- f. Menunda penyetoran tagihan dari langganan, dan menyimpannya untuk sementara (*lapping*).
- g. Mengantongi pembayaran debitur dan mengeluarkan tanda terima yang tidak sah.

4. Indikator-Indikator Munculnya *Fraud*.

Untuk melakukan tugasnya, auditor perlu memahami berbagai indikator *fraud* yang ada dalam perusahaan. Untuk mengetahui kecurangan, petunjuk awalnya biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*), seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari rekan sekerja. Awalnya kecurangan semacam ini tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Indikator yang menandai munculnya kecurangan ini disebut *Red-flags* (*fraud indicators*). Indikator ini tidak otomatis menunjukkan bahwa pasti dalam perusahaan tersebut telah terjadi praktek *fraud*, karena ada kemungkinan lain misalnya ada kekeliruan (*error*). Namun tetap bila auditor menemukan indikator-indikator tersebut, maka kemungkinan besar ada tindakan *fraud* pada perusahaan itu. *Redflags* tersebut belum tentu menjadi indikasi adanya kecurangan, namun *Redflags* ini biasanya selalu

muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisa lebih lanjut terhadap *Redflags* dapat membantu langkah berikutnya memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi.

a. Indikator-Indikator Umum (*redflags*) terjadinya *Fraud*.

Berikut ini beberapa indikator *fraud* yang perlu diwaspadai oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan (Tunggal, 1995: 254-257):

1) Perputaran yang cepat dalam posisi keuangan

Kehilangan personil akuntansi dan keuangan yang penting dapat menandai kinerja yang tidak memadai dan mengakibatkan kelemahan dalam pengendalian intern. Akuntabilitas untuk dana dan sumber daya yang lain harus ditetapkan ketika pemberhentian pekerjaan.

2) Penggunaan usaha mendapatkan pemasok sendiri (*sole-source procurement*)

Praktik-praktik usaha mendapatkan pemasok yang baik mendorong kompetisi untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh material atau peralatan yang diperlukan dengan harga yang paling baik. Usaha mendapatkan pemasok sendiri, apabila tidak cukup dibuktikan akan menunjukkan favoritisme atau pembayaran yang tidak sah (*kickback*) yang potensial.

3) Biaya perjalanan yang berlebihan

Dalam menelaah perjalanan, auditor perlu berhati-hati untuk perjalanan yang tidak diotorisasi atau perjalanan pribadi, dan

perjalanan atau biaya-biaya lain yang sebenarnya tidak ditanggung perusahaan.

4) Pemindahan dana antara perusahaan afiliasi atau divisi

Suatu pola pemindahan dana antar perusahaan atau divisi mungkin menunjukkan pinjaman yang tidak diotorisasi, penutupan kekurangan, atau pengendalian yang tidak memadai atas dana.

5) Perubahan auditor luar.

Dalam kasus tertentu, perubahan auditor luar dapat menunjukkan perbedaan opini mengenai metode yang sesuai dalam menangani transaksi tertentu. Mungkin terdapat suatu keengganan dari manajemen untuk mengungkapkan masalah atas kejadian yang penting.

6) Biaya konsultasi atau honor legal yang berlebihan

Hal ini dapat merupakan indikasi adanya penyalahgunaan dalam memperoleh jasa yang dilakukan diluar, favoritisme, dan masalah yang tidak diungkapkan dalam organisasi yang memerlukan pekerjaan legal ekstensif.

7) Kecenderungan yang menurun dalam angka dan rasio finansial.

Penggunaan rasio, perubahan, dan analisis kecenderungan dapat menunjukkan masalah dalam area tertentu yang memerlukan tindak lanjut. Kecenderungan yang menurun dapat merupakan gejala kerugian yang signifikan, pengalihan dana dan sumber daya, dan pengendalian yang tidak memadai atas operasi.

8) Benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dilaporkan

Auditor harus sadar mengenai desas-desus atau alasan-alasan dari pertentangan kepentingan yang berhubungan dengan pemerkerjaan luar, pengaturan pemasok, dan hubungan antar karyawan. Transaksi perusahaan dengan pejabat atau karyawan harus secara hati-hati diteliti secara cermat.

9) Kekurangan yang tidak dapat dijelaskan dalam aktiva fisik.

Penyimpanan fisik yang tidak memadai dapat mengakibatkan pencurian atau pengalihan aktiva yang lain. Kekurangan dalam aktiva harus dianalisis secara teliti untuk menentukan penggunaan aktiva tersebut.

10) Penurunan dalam kinerja.

Salah satu divisi perusahaan dapat kurang berprestasi dibandingkan dengan divisi lain. Lagipula mungkin terjadi suatu penurunan dalam kinerja dari pengalaman sebelumnya. Alasan harus ditentukan untuk indikasi atas pengelolaan yang buruk atau adanya kemungkinan perbuatan salah.

11) Pengendalian manajemen oleh sedikit individu.

Dominasi organisasi oleh satu atau sedikit individu dapat menciptakan kesempatan pengalihan aktiva atau manipulasi lain.

12) Kesulitan penagihan

Masalah dalam managih piutang dagang harus dianalisis untuk menentukan apakah terdapat penjualan yang fiktif atau pengalihan dana yang diterima dari penagihan.

13) Banyak akun bank

Penggunaan banyak akun bank melebihi apa yang secara normal diperlukan mungkin menunjukkan pengalihan dana atau penutupan transaksi yang illegal. Pemindahan antar akun dan ke akun bank pribadi harus ditelaah dengan hati-hati.

14) Laporan yang terlambat

Laporan mungkin selalu terlambat disampaikan karena penyusun laporan memanipulasi data untuk menutup tindakan curang.

15) Copy digunakan untuk pembayaran kepada kreditur.

Daripada menggunakan pembayaran berdasarkan faktur asli, copy dapat digunakan untuk menutup pembayaran ganda dan pembayaran kembali (*kickback*).

16) Kekurangan, kelebihan dan kondisi yang tidak seimbang.

Hal ini dapat merupakan gejala dari suatu masalah yang lebih besar dan penjelasan harus diperoleh mengenai penyimpangan/varian tersebut.

17) Cek atau dokumen lain yang ditulis dalam angka bulat

Misalnya, suatu cek mungkin tercantum Rp 10.000.000,00 atau Rp 3.500.000,00 padahal cek atau dokumen tersebut secara normal

diharapkan dalam angka yang tidak bulat, misalnya Rp 10.000.261,34 atau Rp 3.500.032,28.

Dalam buku yang sama, Tunggul juga mencantumkan suatu daftar mengenai kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang dapat menandai adanya kecurangan. Daftar tersebut disusun oleh *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* pada tahun 1979 (Tunggul, 1995: 257-259). Daftar tersebut berisi:

- 1) Manajemen senior yang sangat menguasai/mendominasi dan terdapat satu atau lebih kondisi berikut atau yang serupa:
 - a) Dewan direksi dan/atau panitia audit yang tidak efektif.
 - b) Indikasi dari penolakan manajemen atas pengendalian internal yang penting.
 - c) Kompensasi atau opsi saham yang signifikan, yang berkaitan dengan kinerja yang dilaporkan atau terhadap transaksi khusus, yaitu manajemen senior mempunyai pengendalian nyata atau penuh.
 - d) Indikasi kesulitan keuangan pribadi dari manajemen senior.
 - e) Perebutan perwalian yang melibatkan pengendalian perusahaan atau status dari manajemen senior.
- 2) Kemerossotan/kemunduran mutu pendapatan yang dibuktikan oleh:
 - a) Penurunan dalam volume atau mutu penjualan (misalnya, risiko kredit yang meningkat atau penjualan sama dengan atau dibawah harga pokok).



- b) Perubahan yang signifikan dalam praktik usaha.
 - c) Kepentingan yang berlebihan oleh manajemen senior dalam laba per saham (*EPS/Earning per Share*) yang dipengaruhi oleh pilihan akuntansi.
- 3) Kondisi usaha yang dapat menciptakan tekanan yang tidak biasa:
- a) Modal kerja yang tidak memadai
 - b) Kelenturan/fleksibilitas yang kecil dalam pembatasan hutang, seperti rasio modal kerja dan keterbatasan dalam pinjaman tambahan.
 - c) Perluasan atau ekspansi yang cepat dari suatu produk atau lini usaha yang menyolok sekali dengan melebihi rata-rata industri.
 - d) Investasi yang besar dari sumber-sumber daya dalam suatu industri yang mengalami perubahan cepat, seperti suatu industri yang berteknologi tinggi.
- 4) Struktur korporat yang rumit, yaitu kompleksitas yang terjadi tidak tampak diperlukan oleh operasi atau ukuran perusahaan.
- 5) Lokasi usaha yang menyebar disertai oleh manajemen yang didesentralisasi secara ketat, dengan sistem pelaporan tanggungjawab yang tidak memadai.
- 6) Kekurangan staf yang tampak memerlukan karyawan tertentu bekerja pada jam yang tidak biasa, tidak melakukan cuti dan/atau melakukan kerja lembur yang substantial.

- 7) Tingkat perputaran yang tinggi dalam posisi keuangan penting, seperti bendaharawan atau kontroler.
- 8) Sering terjadi perubahan auditor atau penasehat hukum.
- 9) Kelemahan material yang diketahui dalam pengendalian intern yang dapat secara praktis dikoreksi, tapi tidak diperbaiki, seperti:
 - a) Akses terhadap peralatan komputer atau alat pemasukan data elektronik tidak cukup dikendalikan.
 - b) Kewajiban yang tidak sesuai atau bertentangan tapi tidak digabungkan.
- 10) Terdapat transaksi material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau terdapat transaksi yang mencakup benturan kepentingan.
- 11) Pengumuman yang terlalu cepat atau prematur atas hasil operasi atau pengharapan masa depan yang positif.
- 12) Prosedur penelaahan analitis mengungkapkan fluktuasi yang signifikan yang tidak dapat secara wajar dijelaskan, seperti:
 - a) Saldo akun yang material.
 - b) Antar hubungan keuangan dan operasional.
 - c) Selisih penghitungan persediaan.
 - d) Tingkat perputaran persediaan.
- 13) Transaksi besar yang tidak biasa, khususnya pada akhir tahun, dengan pengaruh yang material atas pendapatan.

- 14) Pembayaran besar yang tidak biasa berhubungan dengan jasa yang diberikan dalam usaha normal kepada pengacara, agen, atau pihak lain (termasuk karyawan).
- 15) Kesulitan memperoleh bukti audit yang berhubungan dengan:
 - a) Ayat jurnal yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan.
 - b) Dokumentasi dan atau otorisasi yang tidak lengkap atau hilang.
 - c) Perubahan dalam dokumentasi atau akun.
- 16) Dalam pelaksanaan pengujian laporan keuangan, masalah yang tidak dapat diramalkan ditemukan, seperti:
 - a) Tekanan klien untuk menyelesaikan audit dalam suatu waktu singkat yang tidak biasa atau dalam kondisi yang sulit.
 - b) Situasi pemindahan yang mendadak.
 - c) Tanggapan yang bersifat mengelakkan dari manajemen terhadap penyelidikan audit.

b. Indikator-Indikator terjadinya *Fraud*, dilihat dari bagian tertentu laporan keuangan (Auditor Internal, 2003: 26):

1) Indikator *fraud* pada piutang/penjualan.

- a) Tagihan pelanggan terbagi atas beberapa tahap.
- b) *Prenumbered* yang tidak berurutan.
- c) Alamat pelanggan pada faktur tidak sama dengan alamat yang tertera pada dokumen induk pelanggan.
- d) Alamat yang majemuk untuk alamat pelanggan yang sama.
- e) Adanya penyesuaian non kas debit/kredit pada file pelanggan.

- f) Pelanggan bersaldo kredit.
- g) Pelanggan yang bealamat sama dengan karyawan.
- h) Terjadinya kesalahan yang signifikan pada saldo pelanggan baru.
- i) Rekening yang dihapus-bukukan tidak lama setelah tercatat, biasanya rekening yang sebelumnya tidak pernah ada pembayaran.
- j) Perubahan pada komposisi penjualan.
- k) Pembatalan (*refund*) penjualan menurut lokasi, karyawan, pelanggan dan seterusnya.

2) Indikator *fraud* pada hutang/gaji.

- a) Tidak ada proses konfirmasi pada transfer elektronik
- b) Pembayaran ganda/lebih kepada vendor
- c) Menciptakan vendor fiktif (karena cukup mudah melakukannya)
- d) Tidak ada monitoring atas file masing-masing vendor
- e) Cek dikeluarkan tidak berurutan (lakukan review atas saldo rekening bank)
- f) Vendor dan karyawan yang memiliki alamat/nomor telepon yang sama.
- g) Vendor dan karyawan yang alamatnya adalah PO BOX
- h) Vendor dan karyawan yang memiliki alamat/nomor teleponnya tidak sama dengan database perusahaan.

- i) Vendor dengan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi.
- j) Vendor yang baru tercatat sebagai-rekanan mampu dan vendor lama yang telah dicoret.
- k) Cek dikeluarkan kepada vendor yang tidak tercantum pada daftar rekaman mampu
- l) Cek dikeluarkan kepada vendor yang tidak dikenal yang namanya mirip dengan vendor yang resmi
- m) Cek dikeluarkan kepada vendor tanpa verifikasi yang cukup dari manajemen
- n) Cek yang dikeluarkan untuk pos-pos biaya dan neraca yang tidak lazim
- o) Cek untuk kepentingan pihak ketiga yang diendorse secara individual
- p) Cek dengan tanda tangan berupa stempel
- q) Cek yang dibatalkan tercantum pada rekening bank
- r) Pengeluaran cek tidak tercatat pada register pengeluaran cek, tapi hanya pada jurnal.
- s) Pembayaran yang tidak memerlukan dokumentasi penerimaan barang, misalnya *consultant fee* dan pembayaran komisi.
- t) Karyawan yang tidak menyampaikan laporan perpajakan, tidak memanfaatkan asuransi kesehatan, atau tidak mengklaim biaya pengobatan pada tahun yang bersangkutan.

- u) Karyawan-karyawan dengan nomor keanggotaan Jamsostek yang sama.

3) Indikator *fraud* pada buku besar/laporan.

- a) Jurnal tanpa penjelasan
- b) Jurnal dengan penjelasan “rupa-rupa” atau “penyesuaian”
- c) Jurnal pengeluaran yang menggunakan kas
- d) Rekening bank yang sukar ditelusuri.

c. Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Indikator-indikator *fraud* dapat dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain (Davies dan Parker, 1996:128-130):

1) Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor Integritas atau wewenang manajemen

- a) Manajemen didominasi oleh seseorang (atau sekelompok kecil) dan tidak terdapat komite atau tonggak kekhilafan yang efektif.
- b) Struktur perusahaan yang kompleks dan terlihat tidak berdasar.
- c) Adanya kegagalan yang berkelanjutan untuk mengoperasikan kunci pengendalian atau untuk memperbaiki kelemahan utama sistem pengendalian intern dimana solusinya sebenarnya dapat diterapkan.
- d) Tingginya angka perputaran staf kunci dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.

- e) Adanya kekurangan staf akuntansi yang berkedudukan penting dalam waktu yang panjang.
 - f) Seringnya perubahan konsultan atau auditor
 - g) Fungsi internal audit yang tidak tepat
- 2) **Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor tekanan yang tidak biasa dalam suatu perusahaan**
- a) Ketidalcukupan modal kerja dalam hubungannya dengan penurunan laba ataupun percepatan perluasan usaha.
 - b) Kualitas pendapatan yang menurun, contohnya, meningkatnya resiko pengembalian dalam hubungannya dengan penjualan kredit atau perubahan praktek bisnis.
 - c) Perusahaan membutuhkan peningkatan tren laba untuk mendorong harga pasar sahamnya dalam hubungannya untuk pertimbangan ditawarkan ke publik, pengambilalihan atau alasan lain.
 - d) Perusahaan memiliki investasi yang sangat besar pada salah satu industri atau lini produk yang memiliki tingkat perubahan yang cepat.
 - e) Perusahaan sangat tergantung pada satu atau beberapa produk atau konsumen tertentu.
 - f) Penggunaan tekanan pada staf akuntansi untuk melengkapi laporan keuangan dalam suatu periode waktu yang pendek yang tidak biasa

3) Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor tekanan pasar

- a) Industri menurun dan kegagalan meningkat
- b) Industri merupakan subyek hukum/perundang-undangan baik secara keseluruhan maupun secara spesifik.
- c) Industri mudah berubah dengan tingginya tingkat pengambilalihan atau penggabungan.

4) Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor kejadian dan/atau transaksi yang tidak biasa

- a) Transaksi yang tidak biasa yang berkaitan dengan data neraca yang memiliki pengaruh yang besar terhadap laba.
- b) Transaksi yang menyangkut sekelompok orang yang berhubungan.
- c) Pembayaran untuk jasa (contohnya, untuk pengacara, konsultan) yang berlebihan dalam hubungannya dengan penyediaan jasa.
- d) Pembayaran atas barang yang terlihat sangat rendah atau dibawah harga pasar.
- e) Bukti adanya pemalsuan dokumen
- f) Pembayaran yang sangat besar secara tunai lewat kas ataupun lewat bank pada pihak lain
- g) Pembayaran kepada pejabat dalam negeri maupun luar negeri ataupun pemerintah

- h) Hubungan yang intensif antara perusahaan dengan pihak yang memiliki wewenang berkaitan dengan masalah yang dihadapi perusahaan.
 - i) Penyelidikan yang dilakukan oleh badan perundangan pemerintah ataupun pihak kepolisian.
 - j) Adanya bukti tentang gaya hidup mewah karyawan atau pejabat struktural
- 5) **Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor arsip yang tidak memuaskan dan/atau masalah dalam perolehan bukti audit yang cukup**
- a) Ketidacukupan data akuntansi, contohnya, arsip yang tidak lengkap, penyesuaian yang berlebihan dalam perhitungan, transaksi yang tidak disimpan sesuai dengan prosedur normal dan tidak menunjukkan perhitungan yang seimbang.
 - b) Ketidacukupan dokumen transaksi, seperti, tidak adanya otorisasi yang sesuai, dokumen-dokumen pendukung tidak tersedia dan perubahan dokumen (beberapa dari masalah-masalah dokumentasi ini mempunyai arti penting ketika masalah-masalah tersebut berhubungan dengan transaksi-transaksi yang besar dan tidak biasa)
 - c) Adanya perbedaan angka yang sangat besar antara data akuntansi dengan konfirmasi pihak ketiga, bukti audit yang bermasalah dan perubahan rasio operasi yang tidak dapat

dijelaskan; tindakan mengelak, reaksi yang tidak beralasan atau tidak memuaskan dari manajemen terhadap pemeriksaan audit. Masalah perhatian khusus dapat termasuk, misalnya; adanya kegagalan yang cukup menjelaskan kecenderungan atau hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan, poin-poin yang tidak biasa dalam rekonsiliasi rekening-rekening yang penting, atau investasi yang tidak biasa atas pengadaan dana dalam hubungannya dengan gadai.

- d) Jawaban atas permintaan konfirmasi terlalu sedikit dari yang diharapkan.
- e) Kesulitan dalam memperoleh bukti audit yang berhubungan dengan:
 - (1) Ayat jurnal yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan
 - (2) Dokumentasi dan/atau otorisasi yang tidak lengkap atau hilang
 - (3) Perubahan dalam dokumentasi atau akun
- f) Dalam pelaksanaan pengujian laporan keuangan, masalah yang tidak dapat diramalkan ditemukan, seperti:
 - (1) Tekanan klien untuk menyelesaikan audit dalam suatu waktu singkat yang tidak biasa atau dalam kondisi yang sulit
 - (2) Situasi pemindahan yang biasa

(3) Tanggapan yang bersifat mengelakkan dari manajemen terhadap penyelidikan audit.

6) Indikator-indikator *fraud* berdasarkan faktor-faktor tambahan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan yang berbasis komputer

- a) Perencanaan yang minimal untuk pemasangan teknologi *software* dan *hardware* yang baru.
- b) Kurangnya keterampilan menggunakan komputer diantara staf perusahaan yang saling berkaitan dan/atau pemusatan pengetahuan tentang komputer oleh pihak-pihak tertentu
- c) Penggunaan *hardware* atau *software* yang tidak tepat untuk melakukan fungsi-fungsi penting
- d) Minimnya pengendalian akses fisik atau logikal.
- e) Ketidakmampuan atau ketidaktepatan susunan akses file
- f) Ketidakadaan suatu jejak audit yang bersih dan pembukuan transaksi
- g) Penyebaran atau tidak spesifiknya kepemilikan data
- h) Kegagalan *hardware*, termasuk keterlambatan yang berlebihan dan tertundanya hasil dari input yang dimasukan
- i) Kegagalan *software*
- j) Kegagalan dalam pembatasan akses *software* dan dokumentasi ke pihak yang mengotorisasi

- k) Perubahan program yang tidak didokumentasikan, disetujui dan dities.
- l) Kurang seimbangya transaksi-transaksi komputer database dengan perhitungan keuangan.
- m) Ketidaktepatan data dan media penyimpanan program
- n) Ketidakmampuan prosedur pendeteksian virus dalam sistem.

5. Karakteristik Pelaku *Fraud*

Tidak ada profil khusus pelaku *fraud* yang dapat diidentifikasi oleh auditor. Namun, ada beberapa tipe pribadi tertentu yang patut mendapat pengamatan ketat dari auditor. Hal ini bukan berarti bahwa pribadi-pribadi yang memiliki karakteristik ini, otomatis melakukan praktek *fraud*. Tipe-tipe individu yang perlu mendapat perhatian khusus oleh auditor tersebut adalah individu-individu yang memiliki karakteristik pelaku *fraud* yaitu:

a. Karakteristik umum pelaku *fraud*.

Karakteristik umum pelaku *fraud* antara lain:

- 1) Memiliki hutang pribadi
- 2) Gaya hidup yang mahal
- 3) Gemar berjudi yang intensif
- 4) Pengguna alkohol atau obat keras yang berlebihan
- 5) Memiliki masalah pribadi atau keluarga yang signifikan

b. Karakteristik pelaku *fraud* berdasarkan jabatannya.

Lindquist dan Bologna (1987:53-54), menjelaskan karakteristik pelaku *fraud* berdasarkan jabatan pelaku. Karakteristik pelaku *fraud* berhubungan dengan tingkat kedudukannya dalam perusahaan dan tipe *fraud* yang dilakukannya. Berdasarkan jabatannya, karakteristik pelaku *fraud* antara lain:

1) Karakteristik manajemen puncak yang melakukan *fraud*.

- a) Cenderung berkepribadian yang sangat materialistis. Kesuksesan bagi mereka adalah sukses secara finansial, bukan pengakuan secara profesional.
- b) Cenderung memperlakukan manusia sebagai obyek, bukan sebagai individu, dan sering dijadikan obyek eksploitasi.
- c) Sangat berpusat pada diri sendiri.
- d) Sering bertingkah laku aneh dalam mempertontonkan kekayaan atau cara mereka menggunakan uangnya. Mereka cenderung menarik perhatian pembeli dan sering menyombongkan diri atas segala yang mereka miliki, teman-temannya yang termasuk *high class*, dan segala tempat yang telah mereka kunjungi.
- e) Sering membicarakan tentang kehebatan mereka dalam mencapai kesuksesan dan kemenangannya daripada kegagalan mereka.

- f) Tampak sembrono dan tidak bertanggungjawab terhadap kenyataan.
- g) Tampak telah bekerja keras, hampir sebagai pemacu semangat kerja. Tapi sebagian besar waktu kerjanya untuk membuat rencana kotor dan merancang cara mudah untuk menang atau unggul dalam kompetisi.
- h) Sebagian besar kemungkinan gemar berjudi atau minum minuman keras.
- i) Membeli hadiah yang mahal untuk keluarga mereka, biasanya untuk mengimbangi sedikitnya waktu bersama keluarga.
- j) Menunjukkan permusuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang menentang pandangannya. Mereka merasa dikecualikan dari akuntabilitas dan pengendalian dikarenakan oleh status dan kedudukan mereka.
- k) Menciptakan banyak perputaran antar para bawahannya dan sering memasang satu bawahan untuk melawan yang lainnya.
- l) Menunjukkan bawahan yang disukainya, tapi hubungannya dapat sangat dingin dan sangat cepat karena sang bawahan turun pamor setelah melakukan suatu kesalahan, walaupun karena hanya suatu kesalahan kecil.

- m) Lebih sering mengatur dengan krisis dari pada dengan sasaran hasil. Mereka cenderung terhanyut oleh waktu dan tidak memiliki rencana jangka panjang.
- n) Cenderung mengesampingkan pengendalian intern dengan tak kenal hukum dan membantah dengan penuh ancaman untuk sedikit tampak lebih sebagai formalitas pengendalian.
- o) Meminta loyalitas yang tinggi dari bawahannya tetapi mereka sendiri setia hanya pada keuntungan mereka sendiri.
- p) Memiliki sedikit teman sejati dalam industri atau perusahaannya. Pesaing dan kolega mereka sering tidak menyukai mereka.

2) Karakteristik karyawan tingkat rendah yang melakukan *fraud*

- a) Memiliki hutang pribadi yang besar
- b) Gaya hidup yang mahal
- c) Gemar berjudi yang intensif
- d) Pengguna alkohol atau obat keras yang berlebihan
- e) Memiliki masalah pribadi atau keluarga yang signifikan
- f) Hubungan yang dekat dengan pelanggan
- g) Mendominasi aktivitas tertentu dalam perusahaan
- h) Kerja lembur yang berlebihan dan tidak mengambil cuti
- i) Latar belakang dan referensi yang dipertanyakan
- j) Cuti sakit yang berlebihan

- k) Memiliki perasaan bahwa bayaran yang diterimanya tidak sepadan dengan tanggung jawab yang dipikulnya.
- l) Memiliki keinginan yang besar untuk menghancurkan sistem (*beat the system*)
- m) Peminjaman reguler dalam jumlah kecil dari teman sekerja
- n) Menolak meninggalkan catatan penyimpanan asset tertentu perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya selama hari yang bersangkutan

6. Alasan Dilakukannya *Fraud*.

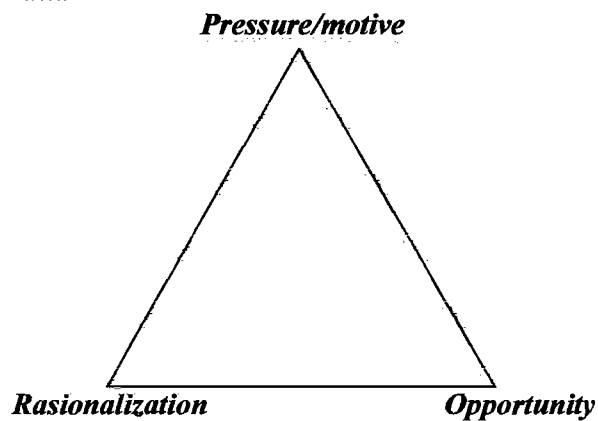
Pada umumnya, *fraud* terjadi karena dipicu oleh faktor tertentu. Adapun tiga faktor utama pemicu *fraud* (Sudarwan, 2003: 31), yaitu dorongan, kesempatan dan alasan pembenaran. Seseorang melakukan kecurangan dapat terdorong oleh kebutuhan, ketamakan, ketidakpuasan atau faktor kejiwaan tertentu. Dorongan ini menyebabkan seseorang mempunyai niat untuk melakukan kecurangan. Niat ini akan direalisasikan apabila terdapat kesempatan yang terbuka, seperti lemahnya pengendalian, birokrasi yang berbelit, serta volume dan kompleksitas kegiatan yang meningkat. Namun tidak setiap niat untuk melakukan *fraud* akan direalisasikan walaupun ada kesempatan, apabila memiliki benteng moral yang cukup tangguh. Benteng moral ini akan semakin terkikis dengan timbulnya berbagai alasan yang dapat membenarkan tindakan kecurangan itu. Pembenaran dapat berupa alasan bahwa kecurangan merupakan hal

yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sebagai kompensasi atas ketidakadilan.

Fraud dilakukan mulai dari sikap permisif masyarakat sampai kepada lemahnya penghukuman kepada para pelaku (Priyatna, 2003:32). Awalnya tidak tahu, kemudian tahu karena terjun ke lingkungan yang memberinya informasi dan pengalaman tentang perbuatan korupsi, sampai akhirnya tergoda untuk melakukannya. Semua itu melalui proses yang namanya belajar.

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Secara sederhana segitiga berikut ini dapat bercerita banyak tentang hubungan-hubungan yang mendorong terjadinya *fraud*.

Gambar IV. 1
Faktor Pemicu *Fraud*



Tekanan/motif dapat terdiri dari kondisi seseorang yang terlilit hutang, membutuhkan biaya pengobatan yang besar, mengalami kesulitan keuangan, atau dapat juga ketamakan, gaya hidup yang jauh di atas pendapatan resminya, ketergantungan/kebiasaan buruk (narkoba atau judi), dan memiliki hubungan di luar nikah (*extramarital affairs*).

Kesempatan (*opportunity*) adalah peluang yang biasanya, meskipun tidak selalu dimanfaatkan oleh karyawan dengan jabatan yang cukup tinggi. Mereka dengan kecerdikannya melihat, mempelajari, dan memanfaatkan kondisi dan kelemahan yang ada pada perusahaan. Hal-hal yang sering memberi dorongan untuk terjadinya *fraud* adalah kelemahan struktur pengendalian intern, misalnya celah pada sistem pengadaan, pengeluaran/penerimaan dana, dan lain-lain. Bisa juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku *fraud*, dapat merupakan preseden buruk bagi karyawan lainnya untuk berani mengambil tindakan serupa/lainnya. Contoh lain adalah apatisisme manajemen, mereka menunjukkan sikap ketidakpedulian/ketidakmampuan untuk mendeteksi adanya *fraud*.

Rasionalisasi lebih mengarah pada alasan/pembenaran yang dianut oleh *fraudsters*. Biasanya mereka berdalih bahwa perusahaan berhutang budi padanya atas prestasi/kinerja yang telah ditunjukkan selama ini. Bisa saja ia mengaku hanya “meminjam” milik perusahaan, atau merasa pantas untuk mendapatkan lebih dari perusahaan, bahkan *fraud* dianggap dilakukan untuk suatu tujuan yang baik.

Masing-masing sudut tersebut tidaklah dibaca yang satu lebih penting dari yang lain, sehingga, tergantung kasusnya, setiap sudut dapat saja menjadi lebih penting dari sudut yang lain. Misalnya saja pada kasus yang melibatkan karyawan dengan tingkatan yang cukup tinggi. Maka sudut yang berperan disini cenderung kepada adanya kesempatan. Dengan kewenangan yang ada padanya ia melihat celah/kelemahan sistem perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadinya. Sedangkan untuk karyawan dengan level lebih rendah bisa jadi rasionalisasi dan tekanan lebih relevan sebagai pemicu terjadinya *fraud*. Mereka dapat beralasan gaji yang terlalu rendah dengan jam kerja yang memeras tenaga/pikiran mereka tidak sebanding dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan yang mendorong pelaku *fraud* melakukan tindakan *fraud*:

- a. Manajemen senior sangat menguasai/mendominasi, dan terdapat satu cara atau lebih kondisi berikut yang sama:
 - 1) Dewan direksi dan/atau panitia audit yang tidak efektif
 - 2) Indikasi dari penolakan manajemen atas pengendalian akuntansi internal yang penting.
 - 3) Kompensasi atau opsi saham yang signifikan, yang berkaitan dengan kinerja yang dilaporkan atau terhadap transaksi khusus, yaitu manajemen senior mempunyai pengendalian nyata atau penuh.

- 4) Indikasi kesulitan keuangan pribadi manajemen senior
 - 5) Perebutan perwalian yang melibatkan pengendalian perusahaan atau status dari manajemen senior
- b. Kemerosotan dan kemunduran dari mutu pendapatan yang dibuktikan oleh:
- 1) Penurunan dalam volume atau mutu penjualan (misalnya, risiko kredit yang meningkat atau penjualan sama dengan atau bahkan dibawah harga pokok)
 - 2) Perubahan yang signifikan dalam praktek usaha.
 - 3) Kepentingan yang berlebihan oleh manajemen senior dalam laba per lembar saham (*EPS/Earning per Share*) yang dipengaruhi oleh pilihan akuntansi.
- c. Kondisi usaha yang dapat menciptakan tekanan yang tidak biasa:
- 1) Modal kerja yang tidak memadai
 - 2) Kelenturan/fleksibilitas yang kecil dalam pembatasan utang, seperti rasio modal kerja dan keterbatasan dalam pinjaman tambahan
 - 3) Perluasan atau ekspansi yang cepat dari suatu produk atau lini usaha yang menyolok sekali dengan melebihi rata-rata industri.
 - 4) Investasi yang besar dari sumber daya pemisahan dalam suatu industri yang mengalami perubahan yang cepat, seperti suatu industri yang berteknologi tinggi.

- d. Struktur korporat yang rumit, yaitu kompleksitas yang terjadi tidak tampak diperlukan oleh operasi atau ukuran perusahaan.
- e. Lokasi usaha yang menyebar secara luas disertai oleh manajemen yang didesentralisasi secara ketat, dengan sistem pelaporan tanggung jawab yang tidak memadai.
- f. Pengendalian intern tidak berjalan sebagaimana mestinya, lemah.
- g. Karyawan diperkerjakan tanpa pertimbangan yang seharusnya berdasarkan kejujuran dan kesetiaan yang dimiliki.
- h. Karyawan tidak dikelola dengan baik, diperlakukan tidak semestinya, atau diposisikan dibawah tekanan yang hebat untuk mencapai tujuan keuangan dan target perusahaan.
- i. Para pimpinan perusahaan sendiri melakukan tindak korupsi, tidak efisien, atau tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin perusahaan.
- j. Karyawan yang dapat dipercaya, memiliki masalah pribadi yang sulit dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan untuk membiayai kebutuhan pengobatan keluarga, atau permasalahan yang berkaitan dengan kebiasaannya mengkonsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang, perjudian, atau gaya hidup yang mahal.
- k. Industri yang menjadi bidang usaha perusahaan mempunyai latar belakang atau tradisi korupsi.

1. Perusahaan sedang terpuruk (misalnya: kehilangan asset karena bencana, atau kehilangan pasar, atau produk yang diproduksi sudah ketinggalan jaman)

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam usaha untuk mendeteksi *fraud* dan melaporkan hasil penemuan *fraud* dalam suatu perusahaan

Salah satu upaya alternatif untuk memberantas dan membuka rahasia korupsi yang dahsyat tersebut adalah pengauditan *fraud*. Auditing jenis ini juga dikenal dengan istilah *forensic auditing* atau pengauditan investigasi. *Financial auditing* yang diterapkan untuk menemukan penyimpangan keuangan untuk dituntut di pengadilan disebut *forensic auditing* yang juga dimaksudkan untuk menemukan korupsi. *Fraud Auditing* mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan. Oleh sebab itu auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *forensic accountant (fraud auditor)*. *Forensic accountant* adalah auditor yang melaksanakan suatu tugas yang berkenaan dengan akuntansi, auditing dan penyidikan pada umumnya dalam suatu forum pengadilan umum atau forum publik lainnya untuk pembahasan yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang akan dipergunakan oleh pihak tertentu. *Forensic accountant* dibekali dengan pengetahuan audit yang mendalam, termasuk akuntansi. Oleh sebab itu *forensic accountant* dapat secara efektif untuk membantu dalam menemukan dan memastikan adanya tindak pidana korupsi.

1. Tipe-Tipe Pengauditan *Fraud*

Ada dua macam pengauditan *fraud* (Kompas, 2 Juni 2005), yaitu:

a. Pengauditan *fraud* proaktif

Pengauditan *fraud* tipe ini merupakan audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko-risiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum/tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian entitas, masyarakat bisnis, atau negara.

b. Pengauditan *fraud* reaktif

Pengauditan *fraud* reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang dapat/berpotensi menimbulkan kerugian entitas, masyarakat bisnis, atau negara. Istilah reaktif didasari pada fakta bahwa auditor melakukan reaksi untuk memvalidasi bukti-bukti indikasi penyimpangan tersebut.

2. Peraturan-Peraturan Sebagai Upaya Pemberantasan *Fraud*.

Telah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga internasional untuk pemberantasan *fraud*, khususnya korupsi. Bahkan, Usaha-usaha untuk memberantas korupsi antara lain dengan pembuatan undang-undang mulai dari Undang-undang No. 3 tahun 1971

sampai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) dengan peraturan pelaksanaannya, peraturan disiplin pegawai dan sumpah jabatan. Bahkan telah dicoba dengan penataran P4, menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, semua ini tidak menunjukkan hasil yang maksimal bahkan korupsi makin mengganas dan bahkan makin tersistem. Berbagai perdebatan dan pemikiran mengenai hal ini mengakibatkan munculnya koalisi dunia yang menyatukan bangsa-bangsa dari utara dan selatan, timur dan barat, negara-negara industri dan negara-negara berkembang, serta negara-negara dalam peralihan. Pada tahun 2003, PBB menyusun *draft* konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi. *Draft* ini akan menjadi payung internasional dalam upaya menggalang pemberantasan korupsi dunia. Konvensi ini mendorong negara-negara berkembang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan, melengkapi sistem hukum undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, konvensi ini mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan korupsi.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan lembaga legislatif negara menyusun dan mensyahkan Undang-Undang No.13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang itu disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yaitu perubahan atas undang-undang no.13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang

tersebut disahkan oleh presiden RI saat itu yaitu: Megawati Sukarno Putri, pada tanggal 21 November 2001.

3. Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil pengauditan *fraud*.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis antara lain:

a. Pihak Pemilik Perusahaan.

Pemilik perusahaan memperoleh manfaat yang sangat besar dari hasil pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis. Dari hasil *fraud auditing* tersebut, pemilik perusahaan dapat mengetahui ada atau tidaknya kecurangan yang terjadi di perusahaan yang dimilikinya. Jika memang ditemukan kecurangan, pemilik dapat mengetahui siapa pelaku kecurangan tersebut serta apa saja kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan kecurangan tersebut. Sehingga pada akhirnya, pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan sebagai langkah tindak lanjut ditemukannya kecurangan tersebut.

b. Lembaga Peradilan dan Penegak hukum.

Manfaat yang diperoleh lembaga peradilan dan penegak hukum dari pemanfaatan hasil *fraud auditing* adalah sebagai bahan pertimbangan yang sangat kuat untuk pemrosesan lebih lanjut kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perusahaan.



c. Pihak Perusahaan Asuransi.

Dalam perencanaan dan penaksiran klaim asuransi, bagi kepentingan perusahaan yang diasuransikan maupun perusahaan asuransi akan sangat terbantu jika menggunakan hasil temuan dalam pengauditan *fraud* untuk mengetahui integritas perusahaan dan penentuan klaim yang tepat.

d. Pemerintah.

Fraud auditor dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan perusahaan, sesuai/tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan kecurangan ini juga digunakan pemerintah untuk membantu pemerintah dalam menyelidiki pengambilan keputusan pemberian subsidi dan bantuan pendanaan.

e. Pihak Perbankan.

Bank sebagai salah satu lembaga pemberian kredit tentu saja sangat terbantu dengan adanya hasil pengauditan *fraud*. Dengan memanfaatkan hasil pengauditan *fraud*, dapat membantu pihak perbankan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit antara lain dalam memperkirakan kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang.

f. Pengacara.

Manfaat yang diperoleh pengacara dari pemanfaatan hasil *fraud auditing* adalah sebagai bahan pertimbangan yang sangat kuat untuk pemrosesan lebih lanjut kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perusahaan.

g. Masyarakat Bisnis.

Masyarakat bisnis juga terbantu dengan adanya *fraud auditing* karena dengan memanfaatkan hasil penyelidikannya, masyarakat bisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Keputusan tersebut meliputi keputusan yang berkaitan dengan antara lain: penanaman modal ke perusahaan, merger, bekerjasama dalam proyek tertentu, dll.

h. Pihak-Pihak Lain yang Berkepentingan dengan Asset Perusahaan.

4. Prinsip-Prinsip Dalam Pengauditan *Fraud*.

Dalam pengauditan *fraud*, ada 13 prinsip yang perlu dipahami oleh auditor sebelum melaksanakan tugasnya dalam mengaudit *fraud*. Ketigabelas prinsip-prinsip tersebut antara lain (Bologna dan Lindquist: 1987, 33-34):

- a. Pengauditan *fraud* tidak seperti pengauditan keuangan. Pengauditan *fraud* lebih dari sekedar menyusun kerangka berpikir secara metodologi.

- b. *Fraud auditor* tidak seperti *financial auditor* (auditor keuangan). *Fraud auditor* memfokuskan pada pengecualian, keanehan, ketidakteraturan akuntansi, pola keteladanan perilaku dan tidak mengandung penghilangan ataupun kesalahan.
- c. Pengauditan *fraud* pada dasarnya dipelajari dari pengalaman, bukan dari buku-buku audit atau kertas kerja tahun lalu. Belajar untuk menjadi seorang *fraud auditor* berarti belajar untuk berpikir seperti seorang pencuri (misalnya: dimanakah titik kelemahan dalam sistem pengendalian internal).
- d. Dari sudut pandang audit, *fraud* adalah sebuah kekeliruan yang disengaja atas fakta-fakta keuangan penting/utama. Dari sudut pandang pengauditan *fraud*, *fraud* adalah sebuah kekeliruan yang disengaja atas fakta-fakta keuangan.
- e. *Fraud* dilakukan untuk alasan ekonomi, pribadi, ideologi, psikologis. Dari keempat alasan itu, masalah ekonomi merupakan alasan yang paling sering ditemukan.
- f. *Fraud* cenderung meliputi teori yang tersusun dari motif, kesempatan dan keuntungan.
- g. *Fraud* dalam lingkungan akuntansi yang sudah kerkomputerisasi dapat dilakukan dalam berbagai bagian pemrosesan, (misalnya: input, proses, output). *Input fraud* lah yang sering dilakukan.

- h. Rencana kecurangan yang paling sering disusun oleh karyawan tingkat rendah adalah yang meliputi pembayaran (misal: pengakuan utang, gaji, laba dan biaya).
- i. Rencana kecurangan yang paling sering disusun oleh manajer tingkat tinggi meliputi pelancaran laba (misal: menunda pencatatan biaya, mencatat penjualan terlalu cepat, mencatat persediaan di atas yang sebenarnya).
- j. *Fraud* dalam pencatatan akuntansi lebih sering disebabkan oleh ketidakadaan pengendalian daripada karena lemahnya pengendalian.
- k. Terkuaknya *fraud* tidak muncul secara periodik, tapi karena munculnya kerugian karena *fraud*.
- l. *Fraud* akuntansi lebih sering muncul karena kebetulan daripada oleh tujuan atau rancangan audit keuangan. Lebih dari 90% kecurangan keuangan ditemukan karena kebetulan.
- m. Pencegahan *fraud* merupakan permasalahan memadainya pengendalian dan kejujuran pribadi dan kesepakatan yang adil di lingkungan kerja.

5. Aspek-Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Melakukan *Fraud Audit*.

a. Empat aspek umum dalam *fraud Audit*

Menurut Priyanto (Kompas, 2 Juni 2005), ada empat aspek umum yang terdapat dalam audit investigasi (*fraud Audit*). Keempat aspek *fraud Audit* tersebut antara lain:

- 1) Permasalahan yang akan diungkap.
- 2) Kriteria berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain.
- 3) Pengumpulan bukti yang sesuai dengan kriteria hukum, dan
- 4) Pelaporan

b. Aspek-aspek *fraud Audit* secara khusus

Aspek-aspek *fraud Audit* secara lebih khusus dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Materialitas Kecurangan yang Kualitatif.

Suatu kecurangan tetap dianggap material secara kualitatif, tidak menjadi masalah beberapa jumlah uang yang tersangkut, alasan definisi ini adalah bahwa:

- a) Kecurangan, menurut sifatnya, dapat berkembang apabila tidak dicegah.

- b) Eksistensi kecurangan sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian.
- c) Kecurangan secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, apabila manajemen melakukan pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

2) Profil Biaya untuk "*Fraud Audits*".

Menguji setiap transaksi memakan biaya yang sangat tinggi. Estimasi ruang lingkup dari suatu kecurangan atau jumlah kerugian selalu tergantung pada kesalahan. Dua dimensi biaya yang penting dari "*Fraud audits*" yang melebihi biaya pemeriksaan langsung adalah masalah-masalah hukum dan publisitas yang buruk. Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau manfaat dari perluasan pemeriksaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah kecurangan pada masa yang akan datang.

3) Ruang Lingkup Masalah.

Ada banyak alasan bagi perusahaan yang memilih untuk tidak "*Go Public*" apabila ditemukan kecurangan. Keadaan yang dapat memalukan perusahaan (*corporate Ambarrassment*); kebanggaan manajemen, publisitas dan citra yang negatif, takut

akan tindakan pembalasan, dan keprihatinan keluarga pelaku atas pengungkapan publik terhadap temuan kecurangan.

4) Informasi yang Sensitif.

Dengan diberikannya ruang lingkup kecurangan, perusahaan secara efektif dipaksa membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas seperti itu. Sifat sensitif dari aktivitas yang curang atau curiga adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

5) Mata Rantai Pelaporan (*Reporting Links*).

Seorang internal auditor harus hati-hati membedakan kecurigaan dengan fakta. Lebih jauh lagi, bukti-bukti harus cukup untuk mendukung penafsiran yang dilaporkan. Banyak perusahaan mungkin mendukung pembentukan mata rantai pelaporan semata-mata untuk mengkomunikasikan kecurigaan. Tujuan pelaporan demikian adalah untuk memungkinkan manajemen menentukan bagaimana laporan dapat digunakan.

6) Pendekatan pemeriksaan unik (*Unique Audit Approaches*).

Dalam pendekatan "*Fraud audits*", suatu analisis ancaman (*threat analysis*) seperti analisis dari pengungkapan kecurangan harus dilakukan. Aktiva apa yang dimiliki? Bagaimana aktiva diperoleh? Konsep dibelakang analisis ini adalah agar dapat lebih pandai dari pelaku kecurangan. Suatu analisis ancaman dapat

membantu mengarahkan rencana pemeriksaan, khususnya menyoroti aktiva yang paling mudah diambil pada waktu mencari kemungkinan adanya kecurangan.

7) Proyek Pengembangan Integritas : Peninjauan Prioritas.

Pada dasarnya keinginan untuk menghindari konflik kepentingan, preferensi untuk menghindari keberatan manajemen, dan dorongan untuk "*Whistle Blowing*" adalah semua topik yang dapat ditekankan dalam proyek pengembangan integritas (*Integrity-Development Project*)

8) Membuat Kesalahan.

Salah satu alat untuk menilai kelemahan dan vulnerabilitas pengendalian terhadap kecurangan adalah membuat kesalahan dan melihat apakah mereka dapat melewati sistem pengendalian. Pendekatan pemeriksaan ini dapat sangat efektif dalam pendeteksi kecurangan. Auditorpun harus hati-hati menelusuri transaksi-transaksi yang demikian dan menjauhinya dari sistem informasi. Langkah ini perlu untuk mencegah kesalahan pencatatan akuntansi.

9) Survei Pendahuluan.

Apabila bagian internal audit diarahkan untuk mendapatkan sesuatu dalam *fraud audits*, suatu tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis ancaman (*threat analysis*). Hal ini dilakukan sehubungan dengan penilaian sebagai dasar untuk

memformulasikan program pemeriksaan. Tentunya akan sangat membantu jika masalah yang timbul selama fase ini dapat dikenali.

10) Kemungkinan Pelanggaran Integritas.

Tipe-tipe pokok ketidakberesan (*irregularities*) yang mungkin timbul adalah penggelapan/pencurian (*embezzlement*), pemerasan (*Extorsion*), penyogokan (*bribery*), kecurangan dalam praktik pengungkapan, pertentangan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

11) Kejadian Masa yang Lampau.

Kecurangan yang terjadi pada masa yang lampau mempunyai implikasi mengenai sikap dan integritas manajemen. Kurangnya tindakan korektif dan atau disiplin pada masa yang lalu sebenarnya dapat mendorong timbulnya masalah pada masa yang akan datang.

12) Kemampuan Sistem Pengendalian untuk menghalangi dan mencegah Kecurangan.

Tindakan perbaikan harus diambil untuk meningkatkan sistem pengendalian agar aktivitas kecurangan pada masa lalu dapat dicegah atau dideteksi pada waktu yang tepat, analisis ancaman, kajian dan evaluasi sistem pengendalian merupakan alat utama untuk menilai kemungkinan ketidakberesan.

13) Keterbatasan yang Melekat pada Sistem pengendalian.

Walaupun tidak ada kelemahan besar yang terdapat dalam pengendalian yang dirancang, tidak ada suatu sistem yang sempurna benar. Pengendalian dapat dikesampingkan dan dihindari dengan akal budi manusia yang lihai. Lebih jauh lagi, kolusi (persekongkolan) dapat membuat pengendalian yang dirancang tidak efektif.

14) Program Audit.

Suatu program pemeriksaan kecurangan harus disusun dan dikembangkan dari survai pendahuluan dalam suatu keadaan yang dapat mengikuti kebijakan perusahaan, menanggapi area risiko yang terbesar, dan menguji hal-hal yang muncul sebagai mode yang tampaknya paling sering perusahaan digelapi uangnya.

15) Perbedaan Utama antara Pemeriksaan Kecurangan dan Penugasan Lain.

a) Penugasan Lain

Pemeriksaan selain pemeriksaan kecurangan, dapat dipandang sebagai pekerjaan diagnostis (*Diagnostic Venture*).

Dalam penugasan demikian, internal auditor:

- (1) Melihat tanda-tanda atau gejala masalah
- (2) Melihat kelemahan dalam sistem.
- (3) Memberi nasehat agar lebih efektif
- (4) Memberi bantuan pada manajemen

(5) Menekankan ketaatan terhadap praktek-praktek yang telah dibentuk, pengendalian yang telah dirancang dan perbaikan-perbaikannya.

b) Pemeriksaan Kecurangan

Sebaliknya pemeriksaan kecurangan adalah pekerjaan menemukan (*Discovery Venture*). Auditor yang mencari kecurangan:

- (1) Mencari bukti ketidakberesan.
- (2) Menentukan rincian dari kelalaian (*Defalcation*)
- (3) Mengkuantifisir kerugian dan/atau ruang lingkup masalah, termasuk waktu, mode dan pelaku (*Preparation*).

16) Pemilihan Tim Pemeriksaan.

Penggunaan Auditor yang berpengalaman sangat diusulkan dalam suatu tim pemeriksaan kecurangan. Alasan utamanya adalah karena sering tidak adanya jejak pemeriksaan. Catatan sering dirusakkan, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja. Tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses pemeriksaan yang lebih rumit. Auditor harus memiliki keterampilan pengembangan yang baik dalam temuan dan wawancara khusus, dan dalam mendokumentasikan diskusi demikian.

17) Dokumentasi Kertas Kerja.

Keamanan kertas kerja sangat diberi perhatian karena banyak kepentingan hukum. Apabila wawancara, catatan tertulis atau komentar harus dimasukkan dalam kertas kerja dengan tanda tangan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Hal ini akan mencegah tuntutan bahwa bukti tidak cukup atau tidak tepat dan membantu menyakinkan keamanan isi terhadap pengujian ulang kemudian.

18) Membuat Draf Laporan Pemeriksaan

Pada saat laporan pemeriksaan kecurangan dikonsepsikan, aspek hukum perlu dipertimbangkan. Demikian juga kualitas dan kecukupan bukti secara keseluruhan perlu diperhatikan. Tindakan perbaikan untuk manajemen biasanya disarankan dalam laporan pemeriksaan kecurangan (*Fraud Audit Reports*).

6. Kemampuan yang Harus Dimiliki Oleh *Fraud Auditor* yang Ahli

Pengauditan *fraud* mengandalkan pada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan melakukan penyidikan. *Forensic accountant (fraud auditor)* dibekali dengan pengetahuan yang dalam tentang audit termasuk juga akuntansi. Orang yang ahli merupakan orang yang dengan keterampilannya mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara mudah, cepat, menggunakan intuisinya, dan sangat jarang melakukan kesalahan. Sedangkan keahlian itu sendiri dapat diartikan sebagai

pengetahuan tentang lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah dalam lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut. Hardjapamengkas memaparkan berbagai pendapat para peneliti mengenai keahlian dalam auditing. Dalam artikel tersebut dikemukakan bahwa di bidang auditing, beberapa peneliti menyamakan keahlian audit dengan pengalaman audit, dan beberapa peneliti lain menggunakan pengalaman ini sebagai variabel pendukung keahlian. Bedrad menyatakan bahwa keahlian audit adalah pengetahuan dan keahlian prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Tan dan Libby mengelompokkan keahlian dalam berdasarkan evaluasi kinerja auditor pada kantor akuntan publik. Evaluasi ini didasarkan pada tugas yang dibebankan pada auditor untuk menangani penugasan dari klien. Penanganan tugas tersebut memerlukan keahlian teknis dan non teknis. Sedangkan Murtanto dan Gudono menyebutkan ada 5 kategori atribut personal yang ahli, yaitu:

- a. **Komponen pengetahuan**, komponen pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman.
- b. **Ciri-ciri psikologis**, Atribut ini merupakan lahiriah seseorang yang memiliki hal-hal personal dari seseorang, yang meliputi kemampuan dalam berkomunikasi, kreatifitas, dapat bekerja sama dengan orang lain, dan kepercayaan terhadap keahlian

- c. **Kemampuan berpikir**, Atribut ini merupakan kemampuan dalam mengakumulasikan dan mengolah informasi. Salah satu contoh dari kemampuan berpikir adalah kemampuan untuk beradaptasi pada situasi yang baru dan mampu memberikan perhatian terhadap fakta yang relevan serta kemampuan untuk mengabaikan fakta yang tidak relevan yang dapat secara efektif digunakan untuk menghindari tekanan.
- d. **Strategi penentuan keputusan**, Strategi penentuan keputusan baik formal maupun informal akan membantu membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian dalam mengatasi keterbatasan manusia, dan
- e. **Analisis tugas**, Analisis tugas dipengaruhi oleh kompleksitas tugas namun karakteristik ini juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman audit dan analisis tugas ini akan mempengaruhi pilihan terhadap bantuan keputusan oleh auditor yang mempunyai pengalaman banyak.

Keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

a. Keahlian Teknis (*Technical Skills*)

Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing. Keahlian mencakup tiga bentuk yaitu: Pengetahuan akuntansi dan auditing,

Pengetahuan subspecial, dan pengetahuan bisnis secara umum. Yang termasuk dalam keahlian teknis adalah:

- 1) Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup relevan, selalu berusaha untuk tahu dan mempunyai visi.
- 2) Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas, dan idealisme.

Sedangkan pengetahuan yang harus dimiliki *forensic accountant (fraud Auditor)* adalah keahlian yang dalam mengenai: akuntansi umum (meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen/biaya); auditing keuangan, manajemen dan operasi; dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu.

b. Keahlian Non Teknis (*Non Technical Skills*)

Keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis mencakup:

- 1) Ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggungjawab, ketekunan, ulet dan enerjik, cerdas dan kreatif, adaptasi, kejujuran, dan kecekatan.
- 2) Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha untuk, menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci.
- 3) Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, obyektif, dan memiliki integritas.

Kemampuan atau keahlian non teknis juga mencakup kemampuan interpersonal yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan dapat bekerja sama serta kemampuan relasional. Keahlian non teknis juga dikelompokkan sebagai keahlian interpersonal, ciri-ciri psikologis, dan kemampuan berfikir.

Disamping itu, *forensic accountant (fraud auditor)* juga harus memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Sikap ingin tahu (*curiosity*)
- b. Curiga profesional (*professional skepticism*)
- c. Ketangguhan (*persistence*)
- d. Kreatifitas (*creativity*)
- e. Kepercayaan (*confidence*)

f. Pertimbangan professional (*professional judgment*)

Fraud auditor dituntut dapat memahami sistem perhitungan dan berbagai istilah serta dokumen resmi. *Fraud auditor* harus memiliki (Bologna dan Lindquist, 1987:87-89):

a. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah keuangan

Saat *fraud auditor* berada dalam situasi yang penuh dengan keluhan, pernyataan tanpa bukti, gosip, pengakuan pendapat, semua itu membuat *fraud auditor* perlu mengidentifikasi secara jelas masalah keuangan yang penting dan membuat keputusan yang tepat waktu. Keputusan ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Berbagai rekomendasi yang akan dihasilkan dari keputusan ini harus mencerminkan pengertian yang umum dan fakta bisnis. Contohnya, jika dokumen-dokumen diperlukan dari yurisdiksi asing, dimana itu mungkin merupakan rekomendasi yang paling layak untuk memperoleh data yang diperlukan, itu tidak selalu dapat diterapkan, alternatif lain pasti tersedia.

b. Pengetahuan tentang teknik investigasi

Pada saat suatu masalah sudah diidentifikasi, dokumentasi dan informasi lebih lanjut harus diperoleh dalam rangka memperoleh bukti yang lebih lanjut. Hal ini akan membantu dalam mendukung ataupun menyangkal pernyataan tanpa bukti atau klaim. Pertanyaan tersebut

tidak sekedar untuk mengetahui keberadaan dokumen keuangan yang relevan, tapi juga untuk mengetahui seluk-beluk tentang penerimaan secara umum prinsip akuntansi, penyingkapan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kesadaran individu yang terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan.

c. Pengetahuan tentang bukti

Fraud auditor harus memahami apa yang mendasari bukti, maksud bukti tersebut, dan bentuk yang merupakan ringkasan akuntansi yang dapat diterima sebagai bukti keuangan di dalam pengadilan.

d. Interpretasi tentang informasi keuangan

Suatu transaksi atau kejadian bisa saja memiliki lebih dari satu interpretasi. *Fraud auditor* harus menjadi sangat mampu menyadari akan prasangka alami yang dapat muncul dalam proses interpretasi.

e. Kemampuan untuk mempresentasikan temuannya

Fraud auditor harus mampu mengkomunikasikan secara jelas hasil penemuan penyelidikannya dalam bentuk yang dapat dipahami orang lain. Presentasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dan dapat menggunakan bantuan demonstrasi yang sesuai.

7. Tindakan yang Harus Dilakukan dalam Pengauditan *Fraud*

Fraud auditing meliputi pengetahuan menyeluruh atas berbagai aspek seperti manusia, tingkah laku berorganisasi, segi-segi kecurangan, bukti-bukti dan standar pembuktian serta kesadaran atas kecurangan yang potensial. Untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Hal ini sulit ditemukan dalam diri seseorang tapi dapat diatasi dengan menerapkan teknik dan prosedur tindak kriminal dalam proses pemeriksaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang “*Fraud Auditor*” antara lain adalah:

- a. Auditor harus menentukan standar. Hal ini berarti auditor harus terjun ke lapangan dan berkomunikasi dengan semua karyawan dan mengerti tujuan yang hendak dicapai manajemen.
- b. Auditor harus mempunyai pengetahuan tentang kemungkinan kecurangan dan dapat menghubungkan dengan berbagai segmen sistem akuntansi atau operasi bisnis. Misalnya pengetahuan tentang lapping dalam sistem penerimaan piutang/pendapatan.
- c. Auditor harus mengetahui cara/prosedur terbaik untuk menyelidiki eksistensi suatu kabar angin atau selentingan yang tidak/belum mempunyai bukti/data pendukung.

- d. Auditor harus memperhatikan motivasi karyawan dan lingkungan kerja tempat karyawan beroperasi untuk menentukan jika ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya jangan sampai karyawan bekerja melebihi deskripsi jabatannya yang dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan kecurangan.
- e. Auditor harus memiliki sensitifitas atas kemungkinan kecurangan terutama sekali terhadap peluang terjadinya kecurangan. Misalnya apakah hanya karyawan A saja yang berkesempatan untuk melakukan kecurangan? Apa keuntungan bagi karyawan tersebut melakukan kecurangan?
- f. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan kompeten untuk memastikan apakah benar telah terjadi kecurangan seperti yang diisukan (*issued*) atau diperkirakan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, jelas bahwa seorang “*Fraud Auditor*” harus mengetahui berbagai prespektif sebagai berikut:

- 1) Manusia dan individu.
- 2) Aspek motivasi, budaya dan organisasi.
- 3) Perekonomian dan persaingan.
- 4) Sosial politik dan lingkungan.

- 5) Hukum, Undang-undang dan pembuktian.
- 6) Akuntansi, pemeriksaan akuntansi dan pengendalian intern

Untuk mencapai tujuan-tujuannya, seorang "*Fraud Auditor*" yang efektif harus melakukan hal-hal di bawah ini:

- 1) Mengkaji pengendalian intern untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya.
- 2) Mengidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan kelemahan yang ada pada sistem pengendalian intern.
- 3) Mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi-transaksi istimewa.
- 4) Membedakan faktor kelemahan dan kelalaian manusia dari kesalahan yang bersifat kecurangan (*fraudulent*).
- 5) Meneliti dokumen pendukung transaksi yang menimbulkan tanda tanya.
- 6) Mengerti dan menyadari prosedur, praktek dan kebijakan perusahaan, manajemen dan administrasi.
- 7) Dapat membuat laporan atas kerugian karena kecurangan, untuk tujuan penuntutan pengadilan ataupun klaim asuransi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keahlian seorang "*Fraud Auditor*" mirip dengan yang dimiliki seorang penyidik

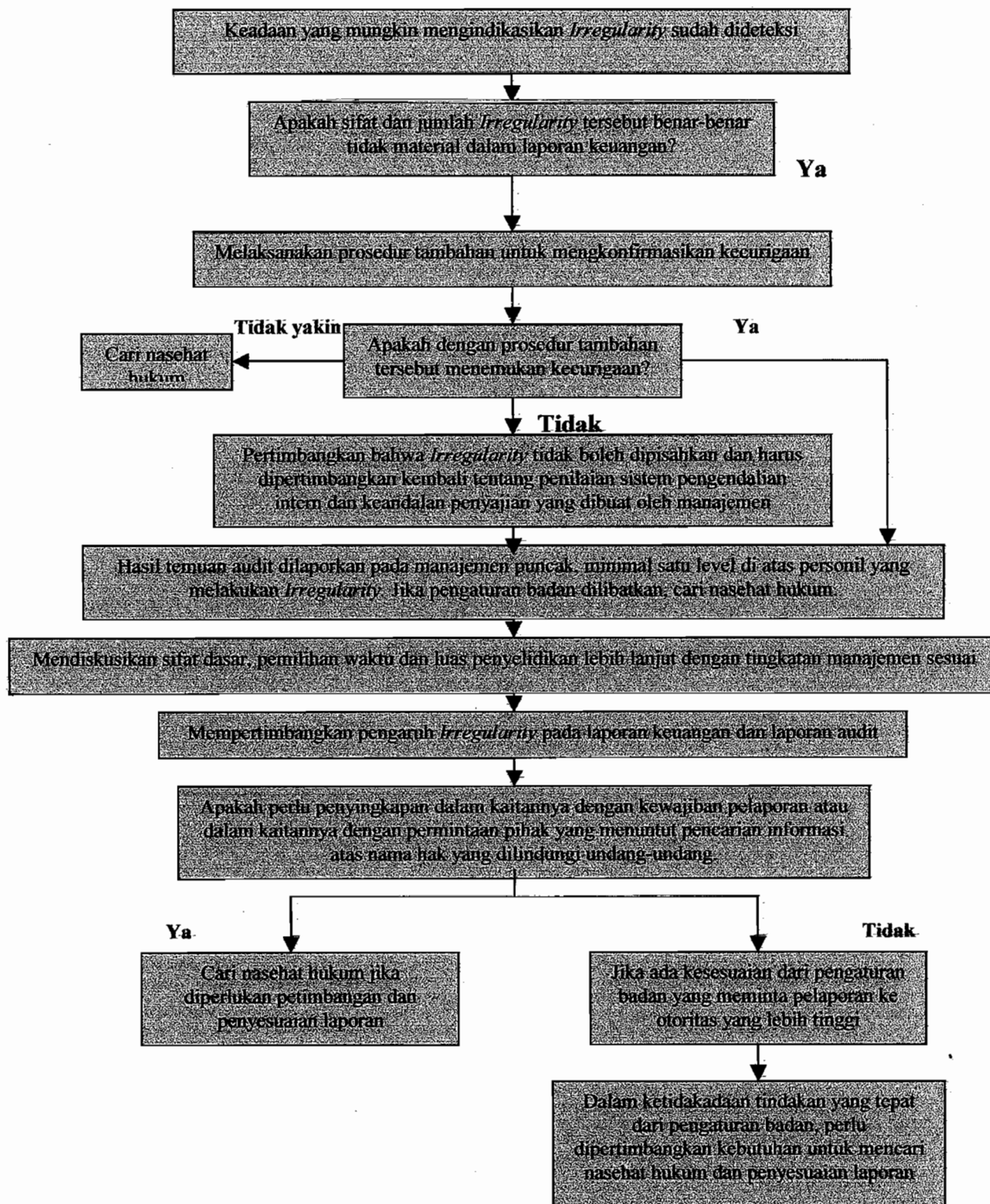
kriminal/detektif. Keduanya eksis untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya. Auditor dalam bidang perlakuan akuntansi yang tepat dan wajar atas transaksi bisnis; sedangkan detektif dalam hal ketaatan warga negara pada hukum atau perundang-undangan. Mereka harus mempunyai rasa ingin tahu dan suka akan tantangan pada hal-hal yang muncul secara tidak lazim, dengan kata lain pada hal-hal yang bertentangan dengan logika atau apa yang diharapkan.

8. Tahap-Tahap Investigasi *Fraud*

Ada beberapa langkah untuk memeriksa dugaan awal adanya *fraud*, sehingga keberadaan *fraud* dapat ditemukan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan adanya ketidakberesan tersebut dapat diringkaskan dalam suatu bagan yang dapat dilihat di Gambar IV.2 (Davies, 1996:131).

Suatu proses yang sistematis juga telah dirancang oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang dapat dijadikan pedoman bagi *fraud auditors*. Gambaran proses pemeriksaan yang dapat diterapkan atas dugaan adanya *fraud* dalam fungsi penjualan, dapat dilihat pada Gambar IV.3 (Auditor Internal, 2003:15).

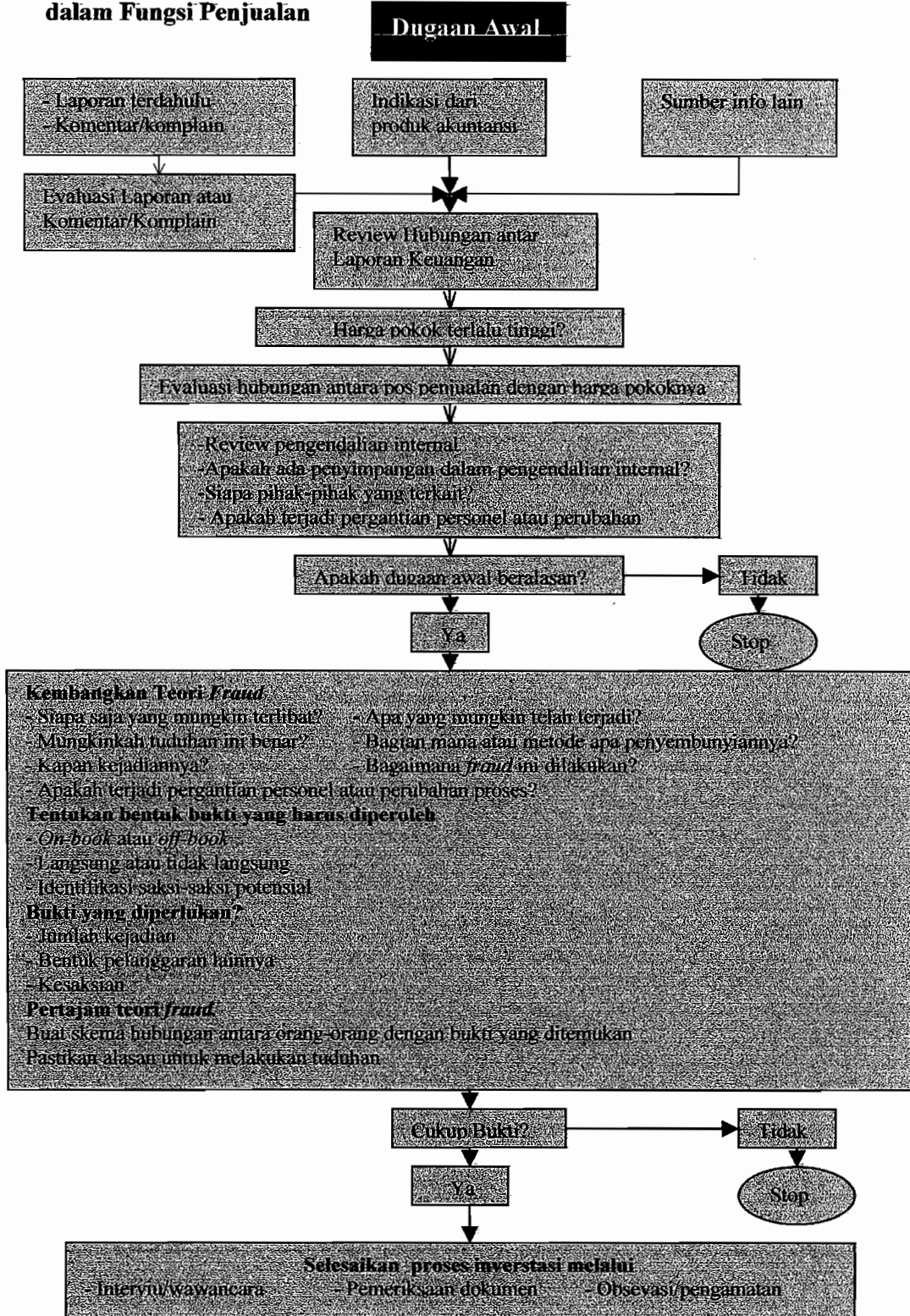
Gambar IV.2
Tanggung jawab Auditor Saat Kemungkinan Keberadaan *Irregularity* sudah Dideteksi



Sumber: Susan Davies & Colin Parker. (1996). *Auditing 1996 Handbook*. Victoria: Prencice Hall of Australia. Halaman 131.

Gambar IV.3

Proses Pemeriksaan yang Dapat Diterapkan Atas Dugaan Adanya *Fraud* dalam Fungsi Penjualan



Sumber: Auditor Internal. Investigasi atas fraud. Edisi Bulan November 2003. hal: 15.

9. Berbagai Contoh Pertanyaan dalam Penginterogasian *Fraud*

Pemahaman secara psikologi tentang pencuri (Hansen dan Buckhoff, 2000: 43-44) adalah bahwa kebanyakan pencuri (pelaku *fraud*) sebenarnya terlihat percaya diri tidak akan tertangkap, akibatnya selama interogator menampilkan wajah yang bersahabat maka tersangka akan berpura-pura bersikap kooperatif sehingga sulit diperkirakan. Interogator yang baik akan memberi perhatian lebih pada tingkah laku atau bahasa tubuh tersangka, seperti kontak mata, gerak kepala, dan gerak badan.

Bagaimana seorang akuntan atau auditor dapat meningkatkan keahlian untuk menjadi interogator yang sukses? Kemampuan interogasi tidak diperoleh secara mudah atau cepat. Cara yang baik untuk memulainya adalah dengan belajar teknik yang disebut *Fraud Assessment Questioning (FAQ)*. FAQ adalah metode interview yang didesain untuk mendapatkan informasi tentang potensial *fraud*. Metode ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa melakukan kebohongan merupakan hal yang tidak alami bagi kebanyakan orang. Sebagai akibatnya pewawancara yang baik dapat menyusun pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tersangka tidak sepenuhnya sadar bahwa informasi yang disampaikan akan menjadi bumerang. Namun harus diakui pula bahwa ada orang yang sangat sulit dibuka kedoknya bahkan oleh seorang interogator yang ahli sekalipun, tapi orang seperti ini hanyalah sebagian kecil saja.



Dalam melakukan tugasnya, interogator harus memulai dengan membangun kembali rasa simpatik karyawan, contohnya, menanyakan tentang jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya, tugas khususnya dan luas pekerjaannya. Kemudian pewawancara dapat meneruskan ke pertanyaan yang menjurus ke *fraud*. Tahap ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk membantu karyawan agar dapat merasa nyaman dengan lingkungan wawancara dan untuk memperhatikan reaksi verbal maupun nonverbal dari karyawan ketika merespon pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan kriminal. Ketika pewawancara kemudian mulai menanyakan pertanyaan yang menjurus ke *fraud*, pewawancara dapat membandingkan reaksi verbal dan nonverbal karyawan. Proses ini disebut "*calibration*", proses ini efektif dalam mendeteksi tipu muslihat dengan melihat perubahan reaksi yang signifikan. Setelah itu pewawancara dapat langsung menuju ke pertanyaan yang lebih menjurus lagi tentang *fraud*. Adapun pertanyaan menjurus tentang *fraud* antara lain (Hansen dan Buckhoff, 2000: 45-46):

- a. **"Saya dimintai untuk melihat dalam masalah pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Pemilik menginginkan saya menanyakan tentang kelakuan yang buruk yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Anda mengerti?"**

Ingat bahwa karyawan tidak sedang dituduh melakukan tindakan yang salah. Maksud dari pertanyaan ini sekedar menanyakan apakah orang

yang diwawancarai sudah mengerti tentang tujuan dilakukan wawancara itu.

- b. **“Jika kita berbicara tentang *fraud* dalam dunia bisnis, kita tidak sekedar membicarakan tentang pengambilan pensil perusahaan atau penggunaan mesin fotokopi untuk kepentingan pribadi, melainkan kita akan menjangkau keseluruhan aktivitas dimana orang mencuri dari perusahaan, kebohongan manajemen atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar yang berkaitan dengan perusahaan. Menurut anda, apakah *fraud* merupakan masalah umum dalam bisnis?”**

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengidentifikasi karyawan (yang jika ada kesempatan), mungkin melakukan tindakan-tindakan *fraud* dalam perusahaan. Jawaban “ya”, mengidentifikasikan karyawan setuju bahwa *fraud* merupakan masalah umum dalam bisnis. Sedangkan jawaban “tidak” mengidentifikasikan karyawan setuju bahwa *fraud* bukan merupakan masalah umum dalam bisnis atau bisa saja karyawan tersebut tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini juga mungkin mengidentifikasikan karyawan tidak nyaman dalam melakukan wawancara dan ingin segera mengakhirinya. Inilah kunci bahwa terwawancara mungkin menyembunyikan sesuatu.

c. **“Menurut anda, apakah perusahaan ini memiliki masalah dengan *fraud*?”**

Pertanyaan ini dapat membuka aktifitas yang berkaitan dengan *fraud* seperti halnya mengidentifikasi resiko tinggi terhadap *fraud* yang dilakukan karyawan. Jawaban “ya” menunjukkan bahwa terwawancara mempunyai pengetahuan yang spesifik tentang *fraud* dalam perusahaan dan dapat dilanjutkan ke pertanyaan lebih lanjut untuk mengorek informasi tentang *fraud* dalam perusahaan. Jawaban “tidak” mengidentifikasi pernyataan asli tentang ketidaktahuannya atau bisa juga menunjukkan pengingkaran masalah. Sejak pertanyaan mulai berubah dari umum menjadi lebih spesifik, terwawancara dapat berpikiran bahwa secepatnya ia akan secara langsung menjadi orang yang dituduh melakukan tindakan *fraud* dan dapat menanggapi dengan mencoba mengakhiri wawancara secepat mungkin.

d. **“Jika karyawan atau manajer dalam perusahaan melakukan tindakan *fraud*, menurut anda apa yang mungkin menjadi alasan mereka?”**

Orang yang jujur cenderung berpikir bahwa pelaku *fraud* pasti juga tidak jujur atau tamak dan tidak akan memberikan pendapat yang rasional dalam meminimalkan masalah. Dalam hubungannya dengan jawaban atas pertanyaan ini, sering kali orang yang tidak jujur akan mengatakan: “Bagaimana saya tau? Saya tidak melakukannya.”

Ketika seseorang sedang tidak secara langsung dituduh melakukan tindakan *fraud*, pengingkaran empatik seperti itu dapat mengidentifikasi resiko tinggi adanya *employees fraud*. Konsekuensinya, area tanggungjawab orang seperti itu harus ditinjau secara hati-hati.

- e. **“Sering terjadi, pencurian kecil oleh karyawan dapat berkembang menjadi jumlah yang lebih banyak. Jika anda mengetahui karyawan lain melakukan pencurian, apa yang anda lakukan?”**

Pertanyaan ini dapat menunjukan karyawan mana yang akrab dengan kebijaksanaan perusahaan dalam kaitannya dengan pelaporan aktivitas yang mengandung *fraud*. Sebagai tambahan, orang jujur secara umum menginginkan untuk melaporkan tindakan *fraud* jika mereka yakin mereka dapat dipercaya dan tersedianya kebijaksanaan perusahaan untuk mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui. Sebaliknya, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun. Orang yang tidak jujur tidak menyukai untuk melaporkan tindakan *fraud* dalam keadaan apapun.

- f. **“Apakah anda mengetahui seseorang yang mungkin saja mencuri atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari perusahaan?”**

Pertanyaan ini tidak hanya memberi kesempatan pada terwawancara untuk mengungkapkan tindakan *fraud* dalam perusahaan yang

diketuinya, tapi juga meningkatkan kemungkinan pengembangan pendeteksian sejak pelaku *fraud* berpikiran bahwa karyawan yang mengetahui perbuatannya akan melaporkannya. Baik pelaku *fraud* maupun orang yang jujur, mungkin enggan untuk melibatkan diri untuk menjawab pertanyaan ini. Pihak yang bersalah cenderung untuk segera menjawab “Tidak” untuk pertanyaan ini. Sedangkan pihak yang tidak bersalah cenderung terlihat ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan ini. Secara umum, pihak yang tidak bersalah dan mengetahui tentang praktek *fraud* yang terjadi, pada akhirnya dapat dibujuk untuk menunjuk pihak yang bersalah.

g. “Seandainya seseorang yang bekerja di perusahaan ini memutuskan untuk melakukan tindakan *fraud*, bagaimana caranya melakukan hal itu dan tidak ketahuan?”

Walaupun pertanyaan ini terlihat membatasi pada pengidentifikasian adanya defisiensi sistem pengendalian intern perusahaan, jawaban terwawancara dapat memberikan tanda tentang kejujuran mereka. Pihak yang tidak bersalah, akan menawarkan gagasan yang dapat dengan tidak ragu-ragu. Sedangkan, pihak yang berkaitan dengan *fraud*, sangat ragu-ragu dalam memberikan informasi seperti ini dan mungkin memberikan jawaban yang tidak spesifik, misalnya: “tidak bisa, mereka akan menangkapmu jika mencuri” atau “seseorang bisa mengambil sesuatu disini dan tidak ada seorangpun yang tahu”.

- h. “Menurut anda, siapa yang paling tidak menduga jika *fraud* benar-benar terjadi di perusahaan ini?”**

Secara umum, orang yang tidak bersalah tidak segan untuk menghapuskan nama orang yang dicurigainya terlibat *fraud*. Bahkan mereka bisa juga mengajukan pengingkaran seperti: “tidak mungkin saya”. Pengingkaran seperti itu untuk pertanyaan yang tidak menuduh dapat mengidentifikasi tingginya risiko munculnya *fraud*.

- i. “Apakah anda pernah berpikir untuk mencuri sesuatu dari perusahaan, walaupun akhirnya tidak anda lakukan?”**

Orang yang bersalah dapat dengan cepat dan meyakinkan langsung menjawab “tidak”. Seringkali pihak yang bersalah mencoba untuk meningkatkan kredibilitasnya dengan mengatakan secara tegas “tentu saja tidak” atau “sungguh, terus terang tidak” atau “saya mengatakan yang sejujur-jujurnya, tidak”. Beberapa dari pihak yang tidak bersalah, mungkin pernah berpikir untuk melakukan tindakan *fraud*, tapi tidak melakukannya. Pihak yang tidak bersalah cenderung merasa tidak perlu untuk meningkatkan kredibilitasnya atau bahkan sama sekali tidak berpikir tentang hal itu. Ingat, bahwa tidak semua jawaban “tidak” berarti bahwa terwawancara terlibat praktek *fraud*.

j. “Apakah ada informasi lain yang dapat melengkapi tentang kemungkinan *fraud* di perusahaan ini?”

Pertanyaan ini memberikan kesempatan terakhir bagi terwawancara untuk memberikan informasi tentang kemungkinan *fraud* di perusahaan. Pihak yang terlibat, dapat dengan cepat menjawab “tidak”, sedangkan pihak yang tidak terlibat mungkin akan ragu-ragu dalam menjawabnya. Keragu-raguan yang disertai dengan berbagai gerakan non verbal antara lain: penggeseran posisi, menyilangkan tangan atau kaki, mengidentikasikan bahwa terwawancara memiliki informasi tapi segan untuk menyampaikannya. Dengan pendekatan yang cukup, pihak yang tidak terlibat dapat dibujuk untuk memberikan informasi tersebut.

Setelah melakukan wawancara tersebut, pewawancara mempersiapkan semua informasi yang berhasil dikumpulkan dari terwawancara. Pewawancara harusnya mengakiri pembicaraannya dengan memberikan ucapan terimakasih atas waktu dan bantuan terwawancara dalam penyelidikan.

10. Hambatan dalam Pengauditan *Fraud*

Kesulitan dalam pengungkapan *fraud* dikarenakan *fraud* merupakan kejahatan terencana. Paling tidak, setiap pelaku merencanakan tiga hal yaitu: bagaimana *fraud* akan dilakukan, bagaimana menyembunyikan tindakan *fraud* yang dilakukannya, dan bagaimana memanfaatkan hasil *fraud*. Ada berbagai hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengauditan *fraud*. Berbagai hal tersebut (Sudarwan, 2003:31) antara lain:

a. Kurangnya kemampuan auditor dalam melakukan pengauditan *fraud*.

Keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh *Fraud auditor* seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada poin IV. 6, sangat sulit ditemui dan hanya sedikit saja auditor yang memiliki kualifikasi demikian. Ditambah lagi *fraud auditor* dituntut untuk mengup-date pengetahuan secara terus menerus dan memperkaya kemampuannya dengan pengetahuan lain yang menunjang.

b. Masalah yang berkaitan dengan Biaya.

Pelaksanaan pengauditan *fraud* membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan biaya yang dikeluarkan dalam pengauditan *fraud* tersebut semakin membesar seiring dengan semakin luas dan spesifiknya ruang lingkup penyelidikan.

c. Masalah Waktu

Seperti halnya biaya, pengauditan *fraud* juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan waktu yang diperlukan dalam pengauditan *fraud* tersebut semakin membesar seiring dengan semakin luas dan spesifiknya ruang lingkup penyelidikan. Penyelidikan akan terhambat jika diberlakukan pembatasan waktu sehingga penyelidikan yang dilakukan tidak maksimal.

d. Tidak kooperatifnya pihak manajer dan atau karyawan yang diperiksa.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan ketidak-kooperatifnya pihak manajer dan atau karyawan yang diperiksa ini. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Adanya kolusi antara pihak-pihak yang diperiksa.
- 2) Pihak yang tidak terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan *fraud* tidak mau memberikan informasi karena ketakutan, tidak ingin membuat keributan akibat informasi yang diberikannya dan ketidaksiapan menghadapi perubahan yang akan terjadi serta khawatir terkena imbas pada perkembangan kariernya.
- 3) Adanya kedekatan emosional antara karyawan sehingga tidak ingin merusak hubungan dengan membantu auditor.

11. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Auditor Dalam Pelaporan Hasil Penemuan *Fraud (Fraud Audit Reports)*.

Pada saat laporan pemeriksaan kecurangan dikonsepsikan, aspek hukum perlu dipertimbangkan. Demikian juga kualitas dan kecukupan bukti secara keseluruhan perlu diperhatikan. Tindakan perbaikan untuk manajemen biasanya disarankan dalam laporan pemeriksaan kecurangan (*Fraud Audit Reports*). Suatu laporan tertulis harus dikeluarkan di kesimpulan dari tahap penyelidikan. Laporan pemeriksaan kecurangan tersebut harus meliputi semua penemuan, kesimpulan, tindakan korektif dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan. Pelaporan terdiri dari pelaporan lisan dan tulisan, pelaporan sementara dan akhir, yang berisi mengenai hasil dan status penyelidikan penipuan. Suatu laporan persiapan atau akhir mungkin sangat diperlukan pada kesimpulan dari tahap pendeteksian. Laporan meliputi kesimpulan hasil pemeriksaan auditor. Laporan tersebut perlu juga berisi tentang ringkasan penemuan yang dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan tersebut. Hasil laporan audit internal dapat digunakan sebagai hasil penyelidikan penipuan. Petunjuk tambahan tentang pelaporan penipuan (*Fraud Audit Reports*) antara lain:

- a. Jika terdapat tindakan *fraud* yang berdampak besar pada perusahaan dilakukan dengan suatu alasan yang pasti, maka manajemen atau dewan pengurus harus diberitahu sesegera mungkin.

- b. Hasil penyelidikan *fraud* mungkin mengidentifikasi bahwa sebelumnya *fraud* tidak memberikan pengaruh yang merugikan secara material pada posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan untuk satu atau lebih dari satu tahun dimana laporan keuangan telah dikeluarkan. Auditor perlu menginformasikan kepada manajemen yang berwenang dewan direktur mengenai penemuan ini.
- c. Suatu laporan tertulis harus dikeluarkan pada kesimpulan tahap penyelidikan. Laporan tertulis tersebut perlu meliputi semua penemuan, kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan korektif yang dapat diambil.
- d. Suatu draft laporan yang diusulkan tentang *fraud* harus disampaikan ke penasehat hukum yang sah untuk tinjauan ulang. Dalam kasus tersebut, jika auditor ingin memberikan pertimbangan khusus yang meringankan klien, maka pertimbangan tersebut dapat diungkapkan pula dalam laporan yang akan diserahkan pada penasehat hukum tersebut.

Hasil pengauditan *fraud* tidak boleh dibocorkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, dimana hasil ini telah diklarifikasikan dan dibacakan ulang kepada *auditee*. Hal ini dilakukan agar *auditee* mengerti sejauh mana investigasi dan eksaminasi dilakukan dan hasil yang didapatkan dari hasil investigasi tersebut. Setelah melakukan investigasi, auditor menyusun hasil atau kesimpulan sementara (*preliminary summary*). Hasil atau kesimpulan sementara ini

akan didiskusikan dengan bos sang auditor sebelum dibuatkan keputusan final hasil audit. Keputusan final yang disebut *executive summary* akan dibuat oleh kepala audit. Hasil *fraud audit* ini dapat dianggap dan digunakan sebagai bukti awal untuk menunjang suatu pembuatan BAP oleh kepolisian atau kejaksaan atau bukti pendahuluan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi bila memang suatu *fraud* diduga terjadi yang mengarah kepada suatu peristiwa kriminal dalam hal ini adalah korupsi. Seorang *fraud auditor* tidak boleh melakukan *deal* dengan *auditee* mengangkut hasil pengauditan *fraud* ataupun dengan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil audit (Kompas, 2 juni 2005: 33).

C. Kasus-kasus Aktual yang Dapat Dijadikan Contoh Penjelas yang Berkaitan Dengan Pengauditan *Fraud* dalam Dunia Bisnis Di Indonesia

1. Bank Global

a. Kasus

Pada tanggal 27 Oktober 2004, salah satu bank di Indonesia yaitu Bank Global, masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Masuknya Bank Global kedalam pengawasan khusus Bank Indonesia disebabkan rasio kecukupan modal (CAR) bank tersebut dibawah angka delapan belas persen yang merupakan batas minimum yang disyaratkan BI. Penurunan CAR bank terjadi karena memburuknya kualitas aktiva produktif khususnya dalam surat-surat berharga dan pemberian kredit (Kompas, 9 Desember 2004).

Sejak saat masuknya Bank Global ke dalam pengawasan khusus Bank Indonesia itu (Kompas, 14 Desember 2004), pemeriksaan intensif pun terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun tim pemeriksa Bank Indonesia kesulitan melakukan pekerjaannya karena pengurus bank kurang kooperatif. Karena itu pada tanggal 10 Desember 2004, Deputy Senior Gubernur BI memanggil para komisaris dan direksi Bank Global untuk menghadapnya. Seluruh komisaris dan direksi, kecuali direktur kepatuhan diminta menandatangani surat pernyataan untuk memberi kesempatan pada BI memeriksa seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu mereka harus memberikan izin kepada BI untuk memeriksa perusahaan penyedia teknologi informasi yang digunakan Bank Global. Bahkan BI sudah melontarkan ancaman keras jika mereka tidak kooperatif dalam memperlancar pemeriksaan yang dilakukan BI.

Audit Khusus Investigasi BI pun dikerahkan. Belakangan ada informasi yang masuk ke BI bahwa pengurus Bank Global berupaya merusak dan menghilangkan dokumen. Sikap tidak kooperatif pengurus bank itulah yang membuat staf pemeriksa dan investigasi BI terus melakukan pengintaian terhadap aktivitas di bank tersebut. Bahkan, pada hari libur pun mereka terus melakukan pengintipan meski dari jauh, di luar halaman bank yang berkantor pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta itu.

BI menurunkan sejumlah anggota staf investigasi, setelah BI mendengar laporan investigasi bahwa ada upaya dari direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank untuk merusak dan menghilangkan dokumen bank. Namun, pada hari pertama penurunan sejumlah staf investigasi tersebut BI belum berhasil membuktikan rencana tersebut karena saat ingin memeriksa ruang-ruang yang dicurigai, anggota staf BI dihalangi direksi, pejabat eksekutif dan sejumlah karyawan Bank Global. Karena itu, menurut pengakuan anggota staf BI, mereka terpaksa begadang mengintai aktivitas di bank itu dari waktu ke waktu.

Kecurigaan BI akhirnya terbukti hari berikutnya. Pada malam harinya, datang dua truk yang masuk ke halaman Bank Global. Kedua truk tersebut dicurigai akan digunakan untuk memindahkan dokumen. Mengetahui hal tersebut, BI lalu meminta bantuan polisi, Pada hari ketiga setelah penurunan sejumlah anggota staf investigasi BI, sekitar pukul 03.00 WIB, anggota staf BI dan polisi menerobos masuk ke Bank Global, termasuk mengamankan kedua truk tersebut.

Ketika anggota staf BI dan polisi menerobos masuk ke ruang-ruang di kantor pusat Bank Global yang dicurigai, mereka menangkap basah direksi, pejabat eksekutif dan sejumlah karyawan sedang mencoba merusak dan memindahkan dokumen. Meski demikian, polisi yang datang tidak bisa langsung melakukan penyitaan karena mereka belum memegang surat perintah penahanan dan penyitaan. Karena itu

mereka hanya bisa mengamankan pengurus yang tertangkap tangan dan truk agar tidak meninggalkan lokasi. Akhirnya sekitar pukul 09.30 WIB polisi membawa sejumlah pengurus bank beserta para supirnya ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diperiksa. Kejadian inilah yang memicu BI membekukan Bank Global tersebut pada tanggal 14 Desember 2004.

b. Analisis Kasus Bank Global

1) Indikator terjadinya *fraud* di Bank Global

Indikator umum terjadinya *fraud* di Bank Global dapat diamati dari adanya kecenderungan yang menurun dalam angka rasio finansial. Dalam hal ini penurunan rasio kecukupan modal (CAR). Selain itu, indikator *fraud* juga dapat dilihat berdasarkan faktor tekanan yang tidak biasa dalam bank tersebut antara lain:

- a) Ketidacukupan modal kerja dalam hubungannya dengan penurunan laba ataupun percepatan perluasan usaha.
- b) Kualitas pendapatan yang menurun, contohnya, meningkatnya resiko pengembalian dalam hubungannya dengan pemberian kredit.
- c) Perusahaan membutuhkan peningkatan trend laba untuk mendorong harga pasar sahamnya dalam hubungannya untuk pertimbangan ditawarkan ke publik.

d) Perusahaan memiliki investasi yang sangat besar pada salah satu industri atau lini produk (dalam hal ini, investasi surat-surat berharga) yang memiliki tingkat perubahan yang cepat.

2) Tipe Pengauditan *fraud* yang dilakukan BI.

Tipe pengauditan *fraud* yang dilakukan BI untuk menangani kasus Bank Global, adalah pengauditan *fraud* reaktif. Pengauditan *fraud* yang dilakukan BI tersebut digolongkan pengauditan *fraud* reaktif karena mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan.

3) Pelaksanaan Pengauditan *fraud* terhadap Bank Global

Pelaksanaan pengauditan *fraud* di Bank Global, mengalami hambatan yang cukup berat karena pihak yang diperiksa (*auditee*) sangat tidak kooperatif. Ketidakkooperatifan *auditee* ini terlihat jelas karena ada upaya yang dilakukan oleh direksi, pengurus, dan beberapa karyawan untuk menghancurkan atau menghilangkan barang bukti yang berupa dokumen-dokumen penting yang akan diperiksa oleh auditor investigasi BI. Melihat tindakan para pengurus Bank Global tersebut, tindakan yang dilakukan oleh auditor investigasi (*fraud auditor*) BI selanjutnya adalah terus melakukan pengintaian yang lebih intensif terhadap aktivitas bank tersebut. Bahkan, pada hari libur pun mereka terus melakukan pengintipan meski dari jauh yaitu dari luar halaman kantor pusat

Bank Global. Para auditor investigasi (*fraud auditor*) BI pun harus terpaksa begadang untuk melakukan pengintaian aktivitas bank itu dari waktu ke waktu.

Kecurigaan BI akhirnya terbukti setelah kedatangan dua truk yang masuk ke halaman Bank Global yang dicurigai akan digunakan untuk memindahkan dokumen. Ketika anggota staf investigasi BI menerobos masuk ke ruang-ruang di kantor pusat Bank Global yang dicurigai, mereka menangkap basah direksi, pejabat eksekutif dan sejumlah karyawan sedang mencoba merusak dan memindahkan dokumen. Pada pagi harinya, polisi membawa sejumlah pengurus bank beserta para supirnya ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diperiksa. Kejadian inilah yang memicu BI membekukan Bank Global tersebut pada tanggal 14 Desember 2004.

2. Bank Mandiri

a. Kasus

Proses audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Bank Mandiri berlangsung sejak Juni 2004 hingga September 2004. Selanjutnya hasil audit disampaikan BPK kepada Bank Mandiri untuk memperoleh tanggapan. Pada akhir Oktober 2004, manajemen Bank Mandiri menyampaikan tanggapannya. Kemudian BPK menyampaikan hasil audit tersebut kepada DPR pada Februari 2005, bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan semester II tahun ajaran 2004. Hal-hal yang menjadi perhatian BPK dalam audit

investigasi yang dilakukannya pada Bank Mandiri, diantaranya penyediaan pencadangan terhadap suatu kredit bermasalah, dianggap sebagai potensi kerugian. Hal itu mengingat dana untuk pencadangan itu sebetulnya dapat dialokasikan untuk membiayai aktiva produktif lainnya, yang memberi pemasukan bagi perusahaan (Suara Pembaharuan, 23 April 2005).

Pada Bulan April 2005, Bank Indonesia mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada PT Bank Mandiri Tbk terkait dengan ketidakhati-hatian dalam penyaluran kredit (Bisnis Indonesia, 12 April 2005). Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan pasca dilayangkannya surat dari bank sentral, pihak manajemen Bank Mandiri menunjukkan adanya perbaikan.

Surat peringatan itu muncul setelah BPK menilai direksi Bank Mandiri tidak berhati-hati dan mematuhi ketentuan yang berlaku ketika mengambil alih asset kredit beberapa perusahaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), rincian kredit tersebut:

TABEL IV.6

Tabel Kredit Bermasalah Bank Mandiri yang Terkait BPPN

Debitur	Baki debit
1. PT Kiani Kertas	US\$ 201,24 juta
2. PT Apac Inti Corpora	Rp 1,17 triliun
3. PT Hak Cipta Graha Nusantara	Rp 160 miliar
4. PT Batavindo Graha Nusa	Rp 54,05 miliar
5. PT Arthabhama Textindo	US\$ 3,64 juta
6. PT Arthatrimustika Texindo	US\$ 2,15 juta
7. PT Staco Graha	US\$ 14,47 juta
8. PT Polyprima Karyareksa	US\$ 135,82 juta
9. PT Seafer General Foods	US\$ 5 juta

Sumber: Bisnis Indonesia, 2 Mei 2005

Dokumen pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa pengambilalihan Kiani dilakukan dengan informasi dan dokumen yang terbatas. Dalam dokumen itu tertulis bahwa syarat penandatanganan perjanjian konsorsium seperti yang telah ditetapkan dalam nota analisa belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu tidak ada analisis resiko dan persetujuan dewan komisaris yang diberikan setelah pengumuman pemenang dari BPPN. Temuan BPK tersebut menyatakan pengambilalihan Kiani sebenarnya belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Bisnis Indonesia, 4 April 2005).

Pada saat terpisah Kejaksaan Agung (Kejakgung) sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp 1 triliun berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit di Bank Mandiri. Pada tanggal 11 April 2005, setelah Kejaksaan melakukan pembahasan bersama BPK terdapat petunjuk jelas telah terjadi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit dan talangan. Penyimpangan prosedur yang terjadi telah menyebabkan potensi kerugian negara. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM pidsus) Sudhono Iswahyudi (Bisnis Indonesia, 12 April 2005), pihaknya bekerjasama dengan BPK menemukan sedikitnya terjadi 24 kasus penyimpangan pemberian kredit yang mengakibatkan kredit macet pada bank BUMN itu sejak tahun 1990-an. Penyimpangan pemberian kredit itu dilakukan melalui fasilitas kredit, dana talangan, dan pengambilan hak tagih terhadap debitor Bank Mandiri.

Menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Kejaksaan telah menyiapkan 10 tim penyidik yang terdiri dari sedikitnya 60 jaksa senior untuk memeriksa dokumen Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil pengauditan *fraud* yang dilakukan, terkait dengan kredit bermasalah Bank Mandiri yang berindikasi tindak pidana, Bank Mandiri melakukan penggantian staf direksi Bank Mandiri. Bahkan sampai dengan tanggal 20 Mei 2005, ketiga mantan direktur Bank Mandiri yang baru saja digantikan tersebut, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan telah ditahan. Ketiga mantan direktur Bank Mandiri yang ditahan tersebut, yaitu: ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan. Selain itu, dari pihak debitur juga telah ditahan empat tersangka: tiga dari PT Cipta Graha Nusantara (CGN), yakni Saipul, Edison, dan Diman Ponijan, serta satu dari PT Siak Zamrud Pusaha, yakni Naser Taher (Kompas, 20 Mei 2005).

Di lain pihak, dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki oleh Bank Mandiri, cukup baik yakni sebesar 23 persen (batas minimum CAR yang ditetapkan BI, 18 Persen). Total asetnya Rp240.5 triliun atau hampir 20% total asset yang dimiliki sektor perbankan. Kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) neto sekitar 1.5 persen dan NPL gros sekitar 7 persen, sementara labanya Rp5.37 triliun. Dengan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri memiliki indikator keuangan yang baik (Kompas, 6 Mei 2005).

b. Analisis Kasus Bank Mandiri

1) Tipe pengauditan *fraud* yang dilakukan BPK terhadap Bank

Mandiri

Tipe pengauditan *fraud* yang dilakukan BPK untuk menangani kasus Bank Mandiri, adalah pengauditan *fraud* proaktif. Pengauditan *fraud* yang dilakukan BPK tersebut digolongkan pengauditan *fraud* proaktif karena pengauditan yang dilaksanakan oleh BPK tersebut merupakan pengauditan yang rutin dan pada proses awal auditnya belum/tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan.

2) Indikator terjadinya *fraud* di Bank Mandiri

Indikator terjadinya *fraud* di Bank Mandiri adalah adanya penyediaan pencadangan terhadap suatu kredit bermasalah yang dianggap BPK sebagai potensi kerugian. Hal itu mengingat dana untuk pencadangan itu sebetulnya dapat dialokasikan untuk membiayai aktiva produktif lainnya, yang memberi pemasukan bagi perusahaan.

3) Pelaksanaan pengauditan *fraud* di Bank Mandiri

Berdasarkan indikator *fraud* yang telah dibahas di atas, tim *forensic audit* BPK melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai segala hal yang berhubungan dengan prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Mandiri. Informasi yang diperkirakan dapat menjadi bahan pertimbangan BPK dalam melakukan

penyelidikan, antara lain informasi yang menyebutkan bahwa Bank mandiri telah membeli (mengambilalih) aset kredit beberapa perusahaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Berdasarkan informasi tersebut, BPK mulai menyelidiki berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pengambilalihan aset kredit BPPN tersebut.

Hasil penelitian BPK melalui dokumen pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa pengambilalihan aset kredit tersebut dilakukan dengan informasi dan dokumen yang terbatas. Dalam dokumen itu tertulis bahwa syarat penandatanganan perjanjian konsorsium seperti yang telah ditetapkan dalam nota analisa belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu tidak ada analisis resiko dan persetujuan dewan komisaris yang diberikan setelah pengumuman pemenang dari BPPN. Temuan BPK tersebut menyatakan pengambilalihan aset kredit tersebut sebenarnya belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Tim BPK juga menemukan adanya skema yang canggih untuk menggunakan Bank Mandiri sebagai sumber pembiayaan dalam pembelian aset BPPN. Berdasarkan laporan BPK, Bank Mandiri belum sepenuhnya menerima *fee* yang harus dibayar pihak ketiga terkait pembelian aset kredit eks BPPN tersebut. Selain itu, Bank Mandiri tidak mendapatkan *income* yang menjadi tujuan pembelian aset kredit eks BPPN. Manajemen Mandiri mengaku telah berupaya menagih

dan tidak berhasil karena kemampuan investor sudah tidak memungkinkan. Kemudian bank tersebut melakukan perjanjian kembali yang memungkinkan pembayaran *fee* diatur kembali.

Hasil pengauditan *fraud* mengungkapkan bahwa kredit bermasalah Bank Mandiri mengandung indikasi tindak pidana yaitu telah terjadinya penyimpangan dalam pemberian kredit. Berdasarkan informasi hasil penyelidikan tersebut, Bank Mandiri melakukan penggantian staf direksi Bank Mandiri. Bahkan ketiga mantan direktur Bank Mandiri ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ditahan. Selain itu, dari pihak debitur juga telah ditahan empat tersangka. BPK juga menyarankan agar Bank Mandiri lebih berhati-hati dalam pemberian kredit di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Tipe-tipe *Fraud*, Indikator *fraud* dan Faktor-faktor Pendorong Munculnya *Fraud* Dalam Dunia Bisnis.

Ada dua tipe salah saji yang sangat relevan dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor tentang kecurangan atas laporan keuangan yang diauditnya yaitu salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva. Kecurangan dapat juga dilakukan oleh manajemen atau seseorang dalam posisi yang dipercaya, yang disebut kecurangan manajemen (*Management Fraud* atau *White-Collar Crime*). Kecurangan dapat pula terjadi karena kegagalan auditor untuk mendeteksi kesalahan (*Errors*) atau kesalahan penyajian (*Misstatements*) yang disebut kegagalan audit (*Audit Failure*). Tipe-tipe *fraud* dapat diklasifikasikan berdasarkan salah saji yang diakibatkannya, berdasarkan pelaku dan korbannya, berdasarkan dampaknya bagi perusahaan dan berdasarkan obyeknya.

Kecurangan yang ditandai dengan munculnya perilaku/kondisi seseorang biasa disebut *Red-flags* (*fraud indicators*). Indikator-indikator



fraud dapat dibedakan berdasarkan bagian tertentu dalam laporan keuangan dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indikator *fraud* dilihat dari bagian tertentu laporan keuangan, meliputi: indikator *fraud* pada piutang/penjualan, indikator *fraud* pada hutang/gaji, dan indikator *fraud* pada buku besar/laporan. Sedangkan indikator *fraud* dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi: indikator *fraud* berdasarkan faktor Integritas/wewenang manajemen, faktor tekanan tidak biasa dalam perusahaan, faktor tekanan pasar, faktor transaksi yang tidak biasa, faktor arsip yang tidak memuaskan dan/atau masalah dalam kecukupan bukti audit, dan faktor tambahan berkaitan dengan lingkungan perusahaan berbasis komputer. Indikator ini tidak otomatis menunjukkan bahwa pasti dalam perusahaan tersebut telah terjadi praktek *fraud*. Namun bila auditor menemukan indikator-indikator tersebut, maka kemungkinan besar ada tindakan *fraud* pada perusahaan itu. Pemahaman dan analisa lebih lanjut terhadap indikator *fraud* dapat membantu langkah berikutnya memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi.

Tidak ada profil khusus pelaku *fraud* yang dapat diidentifikasi oleh auditor. Namun, ada beberapa tipe pribadi tertentu yang patut mendapat pengamatan ketat dari auditor. Hal ini bukan berarti bahwa pribadi-pribadi yang memiliki karakteristik ini, otomatis melakukan praktek *fraud*. Secara umum ada tiga faktor yang mendorong terjadinya *fraud*. Faktor-faktor tersebut adalah *Pressure* (motif), *Rasionalization*, dan *Opportunity* (kesempatan).

2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Auditor Dalam Usaha Untuk Mendeteksi *Fraud* dan Melaporkan Hasil Penemuan *Fraud (Fraud Audit Reports)* Dalam Suatu Perusahaan.

Tindakan yang dapat dilakukan auditor untuk mendeteksi *fraud* dalam suatu perusahaan adalah dengan melakukan *fraud audit (forensic audit* atau audit investigasi). Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mendeteksi *fraud* antara lain yaitu jenis pengauditan *fraud* yang akan dilakukan. Ada dua tipe pengauditan *fraud* yaitu pengauditan *fraud* proaktif dan pengauditan *fraud* reaktif. Usaha-usaha untuk memberantas korupsi antara lain dengan pembuatan undang-undang mulai dari undang-undang No. 3 tahun 1971, Undang-Undang No.13 Tahun 1999 dan kemudian Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Adapun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil pengauditan *fraud* dalam dunia bisnis antara lain: pihak pemilik perusahaan, lembaga peradilan dan penegak hukum, perusahaan asuransi, pemerintah, pihak perbankan atau kreditur, pengacara, masyarakat bisnis, dan pihak lain yang berkepentingan dengan asset perusahaan.

Pengauditan *fraud* mengandalkan pada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan melakukan penyidikan. Keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: Keahlian Teknis (*Technical Skills*) dan Keahlian Non Teknis (*Non Technical Skills*). Sedangkan untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor

terlatih dan penyelidik kriminal. Hal ini sulit ditemukan dalam diri seseorang tapi dapat diatasi dengan menerapkan teknik dan prosedur tindak kriminal dalam proses pemeriksaan. Cara yang baik untuk memulainya adalah dengan belajar teknik yang disebut *Fraud Assessment Questioning (FAQ)*. FAQ adalah metode interview yang didesain untuk mendapatkan informasi tentang potensial *fraud*. Berbagai hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengauditan *fraud* antara lain: kurangnya kemampuan auditor dalam melakukan pengauditan *fraud*, masalah yang berkaitan dengan biaya, masalah waktu, dan tidak kooperatifnya pihak manajer dan atau karyawan yang diperiksa.

Hasil pengauditan *fraud* tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya, dimana hasil ini telah diklarifikasikan dan dibacakan ulang kepada *auditee*. Hal ini dilakukan agar *auditee* mengerti sejauh mana investigasi dan eksaminasi dilakukan dan hasil yang didapatkan dari hasil investigasi tersebut. Laporan pemeriksaan kecurangan tersebut harus meliputi semua penemuan, kesimpulan, tindakan korektif dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan.

3. Kasus-Kasus Aktual yang Dapat Dijadikan Contoh Penjelas yang Berkaitan Dengan Pengauditan *Fraud* dalam Dunia Bisnis di Indonesia?

Contoh kasus penjelas yang dikemukakan dalam skripsi ini terkait dengan pengauditan *fraud* yaitu kasus Bank Global dan Bank Mandiri.

Pada kasus Bank Global, indikator terjadinya *fraud* dapat diamati dari adanya kecenderungan yang menurun dalam angka rasio finansial. Selain itu indikator *fraud* juga dapat dilihat berdasarkan faktor tekanan yang tidak biasa dalam diri bank tersebut. Adapun tipe pengauditan *fraud* yang dilakukan BI untuk menangani kasus Bank Global, adalah pengauditan *fraud* reaktif. Pelaksanaan pengauditan *fraud* di Bank Global, mengalami hambatan yang cukup berat karena pihak yang diperiksa (*auditee*) sangat tidak kooperatif.

Tipe pengauditan *fraud* yang dilakukan BPK untuk menangani kasus Bank Mandiri, adalah pengauditan *fraud* proaktif. Indikator terjadinya *fraud* di Bank Mandiri adalah adanya penyediaan pencadangan terhadap suatu kredit bermasalah yang dianggap BPK sebagai potensi kerugian. Berdasarkan indikator tersebut tim *forensic audit* BPK melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai segala hal yang berhubungan dengan prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Mandiri. Berdasarkan informasi yang diperolehnya tersebut, BPK mulai menyelidiki berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pengambilalihan aset kredit BPPN tersebut.

Pemilihan contoh kasus yang dikemukakan dalam skripsi ini dipilih dengan alasan tertentu. Kasus Bank Global dan Bank Mandiri yang dikemukakan ini merupakan kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia masih dalam kurun waktu satu tahun sebelum skripsi ini disusun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Auditor

Auditor harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melihat dan membedakan *fraud* sesuai dengan tipenya, agar dapat membuat perencanaan yang lebih tepat, relevan dan berguna untuk digunakan sebagai kerangka dasar untuk melakukan pengauditan *fraud*. Selain itu auditor juga harus meningkatkan kualitas pribadinya agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Auditor juga harus menyadari bahwa yang tidak kalah penting dari semua itu adalah seorang *fraud auditor* harus berusaha untuk tidak terpengaruh dengan tawaran yang mungkin diberikan oleh *auditee* atau bahkan ancaman yang ditujukan padanya berkaitan dengan *fraud auditing* yang dilakukannya.

2. Bagi Pemerintah dan Badan Legislatif Negara

Pemerintah bersama badan legislatif negara perlu menyusun undang-undang proteksi bagi seorang *fraud auditor* termasuk perlindungan bagi saksi suatu perkara yang berkaitan dengan *fraud*.

3. Bagi Pemberi Tugas Auditor untuk Melakukan Pengauditan *Fraud*.

Selayaknya imbalan atau gaji seorang *fraud auditor* harus benar-benar dipertimbangkan agar sepadan dengan risiko pekerjaannya. Seorang *fraud*

auditor akan selalu menghadapi risiko terhadap pekerjaannya sesuai dengan besar kecilnya pemeriksaan yang dilakukannya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulisan skripsi memang belum dapat dikategorikan sempurna.

Proses penulisan dan pelaksanaan penelitian ini memiliki keterbatasan:

1. Keterbatasan Peneliti.

Keterbatasan ini muncul karena penulis menghadapi kendala bahasa. Sebagian besar literatur yang digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini merupakan literatur berbahasa Inggris. Maka dalam penulisannya, ada beberapa istilah yang tetap ditulis dalam Bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahan dalam menterjemahkan yang menyebabkan salah penafsiran.

2. Keterbatasan Data

Keterbatasan ini muncul berkaitan dengan jenis penelitian yang merupakan studi pustaka, analisis data yang digunakan sangat tergantung dengan data yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya merupakan data sekunder. Hal ini mengakibatkan pembahasan yang dilakukan, khususnya dalam menganalisis kasus aktual yang berkaitan dengan pengauditan *fraud* di Indonesia, tidak dapat dianalisis secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison. *Fraud Auditing (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)*. www.fcgi.or.id
- Arie, Hanief. (1999). The Association of Certified Fraud Examiners' Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse (Wells Report). *Media Akuntansi*, No. 4/ Th.I/ Oktober- November 1999. hal: 68.
- Bologna, Jack & Robert J Lindquist. (1987). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc.
- Cooper & Yuji Ijipi. (1984). *Kohler's Dictionary for Accountant* (ed.6). New Delhi: Prentice Hall of India.
- Davies, Susan & Colin Parker. (1996). *Auditing 1996 Handbook*. Victoria: Prentice Hall of Australia.
- Griffin, Ricky W & Ronald J Ebert. (2000). *Business* (ed.5). New Jersey: Prentice Hall International, inc.
- Guritno, T. (1994). *Kamus Istilah Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Hansen, James D & Thomas A Buckhoof. (2000). To Catch A Thief. *Journal of accountancy*, Maret 2000. Jersey City.
- Harahap, Sofyan Safri. (1991). *Auditing Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Hardjapamekas, Erry Riyana. (1999). *Hasil Audit dan Integritas*. Edisi 3/ IV Tanggal 11 oktober 1999. www.akuntanpublik.org.
- IAI-Kompartemen Akuntan Publik. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indiro, Gitosudarmo. (1992). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Jusup, Haryono. (2001). *Auditing*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Moller, Robert & Herbert Witt. (1999). *Brink's Modern Internal Auditing, fifth edition*. Canada: John Wiley & Sons, inc.
- Muhammad, Agus. (2003). *Occupational Fraud*, upaya awal mengikis KKN. *Auditor Internal*, Edisi November 2003, hal: 12.

- Mulyadi. (1998). *Pemeriksaan Akuntan* (ed. 4). Yogyakarta: Bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Noeha, Dasriel Adnan. (2005). *Kompas*. Audit Investigasi, Bukan Sekadar Audit. 2 Juni 2005, hal: 33.
- Priyanto, Joni Agung. (2005). *Kompas*. Audit Investigasi dan Pengungkapan Indikasi KKN di KPU. 2 Juni 2005, hal: 34.
- Priyatna, Nanang. (2003). Belajar dari Korupsi untuk Tidak Korupsi. *Auditor Internal*, Edisi November 2003, hal: 32.
- Poerwadarminta W J S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwo, Minto S, dkk. (2002). *Pelajaran Ekonomi (Untuk Kelas 1 SLTP)*. Jakarta: Yudistira.
- Sofyan, Irwan.(2003). Ciptakan Budaya Anti *Fraud* dengan Membangun Nilai-Nilai Etika. *Auditor Internal*, Edisi November 2003, hal:16.
- Stoner & Edwin Dolan. (1998). *Introduction to Business*. London: Scott, foresman and company.
- Sudarwan. (2003).. Cara Efektif Menangani Risiko *fraud* secara Komprehensif. *Auditor Internal*, Edisi November 2003. hal: 31.
- Suryana. (2001). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahrul & M Afin Nizar. (2000). *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Tuanakota, Theodorus M. (1997). *Auditing (Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- Tunggal, Amin Widjaja. (1991). *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tunggal, Amin Widjaja. (1995). *Audit Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Harvarindo.
- . (2003). *Auditor Internal*. Investigasi atas fraud. Edisi Bulan November 2003. hal: 15.
- . (2003). *Auditor Internal*. Audit Investigasi dalam Pemberantasan korupsi. Edisi Bulan November 2003. hal: 20.

- . (2004). *Bisnis Indonesia*. Bank Global Dibekukan. Edisi 14 Desember 2004, hal: B3.
- . (2005). *Bisnis Indonesia*. Bank Mandiri Tidak Hati-Hati Soal Kiani. Edisi 4 April 2005, hal: B1.
- . (2005). *Bisnis Indonesia*. BI Tegur Bank Mandiri soal Kredit Bermasalah. Tanggal 12 April 2005, hal: B2.
- . (2005). *Bisnis Indonesia*. Mandiri “Terpeleset” Aset BPPN. Tgl 2 Mei 2005, hal: B3.
- . (2004). *Kompas*. BI Larang Bank Global Konversi Dana ke Deposito. Tanggal 9 Desember 2004, hal:19.
- . (2004). *Kompas*. Drama Dibalik Pembekuan. Tanggal 14 Desember 2004, hal: 21.
- . (2005). *Kompas*. Miranda: Bankir Jangan Khawatir Berlebihan. Tanggal 6 Mei 2005, hal: 17.
- . (2005). *Kompas*, Piutang Macet Bank Mandiri Rp 10 Triliun. Tanggal 20 Mei 2005, hal: 17.
- . (2004). *Koran Tempo*. Bank Global Sudah Masuk Pengawasan Khusus BI. Edisi 3 Desember 2004, hal: A17.
- . (2005). *Suara Pembaruan*. Agunan di Bank Mandiri Rata-rata Melebihi 100 Persen. Edisi 23 April 2005, hal: 7.
- . (2001). *Media Akuntan*. Audit Forensik PwC Menabur Angin, Telkom Menuai Badai. Edisi: 22/November-Desember 2001. hal: 31-33.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA:

Nama: Antonia Mathilda Srimulyani Hamboer

Tempat/Tanggal Lahir: Ruteng, NTT / 05 Juli 1983

Alamat: Jalan Gejayan No. 55 Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- 1987 s/d 1989 : Taman Kanak-Kanak di TK INVIOLATA, Ruteng, NTT.
- 1989 s/d 1993 : Sekolah Dasar di SDK RUTENG V, Ruteng, NTT.
- 1993 s/d 1995 : Sekolah Dasar di SD Kanisius Temanggung Jawa Tengah.
- 1995 s/d 1998 : Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SLTP Pangudi Luhur 2
Yogyakarta.
- 1998 s/d 2001 : Sekolah Menengah Atas di SMU Stella Duce 2 Yogyakarta.
- 2001 s/d 2005 : Program Strata 1 (S1) di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

LAMPIRAN

Praktek-Praktek *Fraud* yang umum terjadi menurut Harahap (1991: 253):

- a. Mencuri perangkat.
- b. Mencuri barang dagangan, alat-alat, supplies, suku cadang dari peralatan besar.
- c. Mengambil uang kas dari brand kas atau *check register*.
- d. Tidak mencatat penjualan tapi langsung mengantongi hasilnya.
- e. Meminta uang kas lebih besar dan mencatatnya lebih rendah.
- f. Memperbesar biaya atau mendahulukan pembayaran untuk kepentingan sendiri.
- g. Menunda penyeteroran tagihan dari langganan, dan menyimpannya untuk sementara (*lapping*).
- h. Mengantongi pembayaran debitur dan mengeluarkan tanda terima yang tidak sah.
- i. Menagih piutang dan menghapuskan perkiraan debitur yang bersangkutan.
- j. Mengeluarkan pinjaman kepada langganan fiktif.
- k. Membebani perkiraan langganan untuk kas yang diambil.
- l. Menyetorkan uang setoran hasil ke perkiraan sendiri.
- m. Mengubah bukti penerimaan uang untuk menutupi kecurangan.
- n. Kiting. Menarik uang untuk menutupi perkiraan tertentu dan tidak mencatat penarikan tersebut.
- o. Menaikkan tarif upah, membuat lembaran daftar gaji fiktif.

- p.** Membayar gaji pegawai yang sebenarnya tidak berhak.
- q.** Menambah-nambahi pos gaji pegawai dan mengambilnya untuk kepentingan sendiri.
- r.** Menghancurkan faktur dan mengubah setiap penjualan kas serta mengantongi uangnya.
- s.** Mengambil penjualan kas dan membuat perkiraan fiktif.
- t.** Mencatat potongan penjualan yang tidak sah.
- u.** Menambah voucher petty cash untuk mengisi kas kecil.
- v.** Menggunakan bon pribadi untuk menutupi pembayaran yang tidak sah.
- w.** Menggunakan kopi bukti yang sudah dimanfaatkan untuk mencuri kas.
- x.** Membayar faktur palsu kepada pemasok dengan cara bersekongkol.
- y.** Menaikkan harga barang dari pemasok dengan cara bersekongkol.
- z.** Membebani perusahaan untuk pembelian barang pribadi.
- aa.** Membebani langganan fiktif atas penjualan barang.
- bb.** Mengirim barang yang dicuri ke rumah kawan/kolega.
- cc.** Memalsukan persediaan untuk menutupi pencurian yang dilakukan
- dd.** Mengeluarkan cek kepada perusahaan lain atau langganan yang tidak berhak.
- ee.** Memperbesar cek yang sudah dikeluarkan untuk menutupi penyelewengan.
- ff.** Memasukkan catatan fiktif kedalam buku besar.
- gg.** Sengaja membuat penjumlahan kas masuk/kas keluar salah untuk menutupi kesalahan.
- hh.** Sengaja membuat bingung pemindahbukuan dari buku besar ke buku tambahan.

- ii. Menjual barang rusak untuk kepentingan sendiri.
- jj. Membuka buku besar yang bersaldo kredit dan mengambil uang kas atas perbedaannya.
- kk. Memasukkan *bill of lading* dan hasilnya dibagi-bagi.
- ll. Memalsukan tanda tangan untuk pengambilan uang melalui cek.
- mm. Memberikan harga “damai” kepada klien dan kemudahan lain kepada langganan/seseorang dan mendapatkan umpan balik atas pelakuan ini.
- nn. Menghapuskan piutang yang sehat dan menagihnya untuk kepentingan sendiri.

